



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI SUMBA TENGAH



WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH

WAIBAKUL 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
INSPEKTORAT

Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul – Waibakul
Website: sumbatengahkab.go.id Email: inspektoratsumteng@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS
RANCANGAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan kesatuan dari pernyataan ini.

Waibakul, 19 Maret 2025



Plt. Inspektur
Kabupaten Sumba Tengah

CHARLES N.U.G.SABARUA,SE

Pembina Tk.I-IV/b

NIP. 19771108 201001 1 009

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	
Pelaksana	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dimampukan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan dokumen yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya di tingkat Pusat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan perhatiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumba Tengah dapat berjalan dengan baik, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini.

Sajian data dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini telah diupayakan semaksimal mungkin berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik tata cara penulisan maupun dalam penyajian data dan informasi, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan dari semua pihak demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati serta memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan menuju Tana Waikanena Loku Waikalala tercinta.

Waibakul, 21 Maret 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	28
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	59
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	61
2.1. Capaian Kinerja Makro	61
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	61
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	61
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	141
1.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	158
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	163
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	186
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	192
4.1. Urusan Pendidikan	192
4.2. Urusan Kesehatan	195
4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200
4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	203
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	205
4.6. Urusan Sosial	209
BAB V PENUTUP.....	214

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Kecamatan	1
Tabel 1.2	Jumlah penduduk dan jumlah KK menurut Kecamatan tahun 2024	2
Tabel 1.3	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan	3
Tabel 1.4	Rincian Aparatur Sipil Negara	5
Tabel 1.5	Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	9
Tabel 1.6	Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	14
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.....	61
Tabel 2.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	163
Tabel 2.3	Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024	166
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Sumba Tengah	189



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sumba Tengah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahirnya Undang-Undang tersebut telah memberikan bukan saja keluasaan aksesibilitas terhadap berbagai kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan, namun juga telah memberikan dampak-dampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Sumba Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membentang antara 9° 20’– 9°50’ Lintang Selatan (LS) dan 119° 22’ – 119° 55’ Bujur Timur (BT).

1. Batas Administrasi Daerah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur;
2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah 1.869,18 km2. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dimana hampir 50% luas wilayahnya memiliki kemiringan 140-400. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan luas 625,77 km2 (33,48%) dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Katiku Tana dengan luas 78,83 km2 (4,22%). Dari total luas wilayah tersebut dibagi dalam luasan wilayah menurut Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km ²)	Persentase
1	Katiku Tana	7	78,83	4,22
2	Katiku Tana Selatan	9	368,34	19,71
3	Umbu Ratu Nggay Barat	15	246,29	13,18
4	Umbu Ratu Nggay	11	625,77	33,48
5	Umbu Ratu Nggay	10	191,36	19,18
6	Mamboro	13	358,59	10,24
	Jumlah	65	1.869,18	100,00

Sumber: Kompilasi Pada Bagian Pemerintahan Tahun 2025

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Penduduk Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024 berjumlah 92.138 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mambooro yaitu 20.840 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah yaitu 9.093 jiwa. Rincian jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Jumlah KK menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	Total	
1.	Katiku Tana	7.034	6.834	13.868	3.536
2.	Katiku Tana Selatan	7.953	7.742	15.695	3.963
3.	Umbu Ratu Nggay	6.336	6.047	12.383	3.461
4.	Umbu Ratu Nggay Barat	10.464	9.795	20.259	5.233
5.	Mambooro	10.671	10.169	20.840	5.043
6.	Umbu Ratu Nggay Tengah	4.731	4.362	9.093	2.493
Jumlah		47.189	44.949	92.138	23.729

Sumber: Dinas Dukcapil Sumba Tengah Tahun 2025

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Tengah adalah 32 (tiga puluh dua) perangkat daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah terdiri atas 8 (delapan) unit kerja (bagian). Adapun rincian perangkat daerah/unit kerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah, terdiri dari unit kerja sebagai berikut:	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
a.	Bagian Pemerintahan	Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
c.	Bagian Hukum	
d.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
e.	Bagian Administrasi Pembangunan	
f.	Bagian Umum	
g.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
h.	Bagian Organisasi	
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagai mana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
3.	Inspektorat Daerah	
4.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
5.	Dinas Kesehatan	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
12.	Dinas Lingkungan Hidup	
13.	Dinas Perikanan	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
16.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
19.	Dinas Perhubungan	

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
20.	Dinas Peternakan	
21.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
23.	Badan Keuangan Daerah	
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
27.	Kecamatan Katiku Tana	
28.	Kecamatan Katiku Tana Selatan	
29.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	
30.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	
31.	Kecamatan Mamboro	
32.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	

Sumber: Bagian Organisasi Tahun 2025



e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.4

Rincian Aparatur Sipil Negara

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	Fungsi Staf	16	25	31	72
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi Staf	4	5	4	13
3.	Inspektorat Daerah	Fungsi Pengawasan	6	27	0	33
4.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrag	Urusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga	13	18	19	50
5.	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	8	30	13	51
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan pekerjaan umum dan pentaan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	10	23	19	52
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Urusan trantibumlinmas	17	4	5	26
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Urusan Sosial, dan urusan Pemberdayaan Perempuan	6	9	7	22

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Anak	dan Perlindungan Anak				
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	7	5	6	18
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	6	8	21
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan pertanian dan urusan pangan	8	92	9	109
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan lingkungan hidup	5	17	1	23
13.	Dinas Perikanan	Urusan kelautan dan perikanan	5	16	6	27
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	8	8	2	18
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian	5	5	8	18
16.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Koperasi, UKM, urusan perindustrian dan urusan perdagangan	8	13	7	28

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan	3	14	4	21
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan pariwisata dan urusan kebudayaan	7	16	9	32
19.	Dinas Perhubungan	Urusan perhubungan	10	2	5	17
20.	Dinas Peternakan	Urusan pertanian	6	25	17	48
21.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	Urusan Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal	5	13	7	25
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan	7	9	7	23
23.	Badan Keuangan Daerah	Fungsi penunjang manajemen keuangan, dan perencanaan dan keuangan	18	6	12	36
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi penunjang kepegawaian	6	6	14	26
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan	Fungsi penunjang	6	9	4	19

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Politik					
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fungsi penunjang	5	1	6	12
27.	Kecamatan Katikutana		9	1	4	14
28.	Kecamatan Katikutana Selatan		9	0	1	10
29.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay		9	0	4	13
30.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat		9	0	6	15
31.	Kecamatan Mamboro		9	0	7	16
32.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah		9	0	3	12
Total						874

Sumber: Bagian Organisasi Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	U R A I A N	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI APBD TA. 2024	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	3	5 = (4 - 3)	6
4	PENDAPATAN	672.754.347.358,00	658.586.168.778,14	(14.168.178.579,86)	97,89
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.240.524.743,00	23.771.935.572,56	(4.468.589.170,44)	84,18
4 1 01	Pajak Daerah	8.746.702.792,00	7.277.151.931,61	(1.469.550.860,39)	83,20
4 1 02	Retribusi Daerah	3.231.100.000,00	2.286.739.167,00	(944.360.833,00)	70,77
4 1 03	Pegelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.759.129.716,00	2.759.129.716,00	-	100,00
4 1 04	lain - lain PAD yang sah	13.503.592.235,00	11.448.914.757,95	(2.054.677.477,05)	84,78
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	639.188.113.307,00	629.340.026.908,00	(9.848.086.399,00)	98,46
4 2 01	Pendapatan Transfer Pem. Pusat				

KODE	U R A I A N	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI APBD TA. 2024	LEBIH/ KURANG	%
		616.883.525.291,00	610.458.438.358,00	(6.425.086.933,00)	98,96
4 2 01 01	Dana Perimbangan	538.007.258.291,00	531.582.191.358,00	(6.425.066.933,00)	98,81
4 2 01 05	Dana Desa	65.947.260.000,00	65.947.240.000,00	(20.000,00)	100,00
4 2 01 06	Insentif Fiskal	12.929.007.000,00	12.929.007.000,00	-	100,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.304.588.016,00	18.881.588.550,00	(3.422.999.466,00)	84,65
4 2 02 01	Pendapatan bagi Hasil	22.304.588.016,00	18.881.588.550,00	(3.422.999.466,00)	84,65
4 2 02 02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4 3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.325.709.308,00	5.474.206.297,58	148.496.989,58	102,79
4 3 1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.325.709.308,00	5.474.206.297,58	148.496.989,58	102,79
5	BELANJA DAERAH	714.620.603.497,91	663.337.773.448,84	(51.282.830.049,07)	92,82
5 1	BELANJA OPERASI	489.545.248.718,91	439.345.406.271,50	(50.199.842.447,41)	89,75
5 1 01	Belanja Pegawai	247.332.662.000,60	214.219.723.029,00	(33.112.938.971,60)	86,61

KODE	U R A I A N	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI APBD TA. 2024	LEBIH/ KURANG	%
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	206.591.399.643,31	190.163.561.742,50	(16.427.837.900,81)	92,05
5 1 05	Belanja Hibah	30.122.187.075,00	30.093.121.500,00	(29.065.575,00)	99,90
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	5.499.000.000,00	4.869.000.000,00	(630.000.000,00)	88,54
5 2	BELANJA MODAL	120.727.171.304,00	120.405.680.942,34	(321.490.361,66)	99,73
5 2 01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.225.897.114,00	13.284.715.614,45	58.818.500,45	100,44
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.974.794.490,00	8.891.385.407,89	(83.409.082,11)	99,07
5 2 04	Belanja Modal Jalan,Jaringan & Irigasi	98.294.182.480,00	98.063.043.920,00	(231.138.560,00)	99,76
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	232.297.220,00	166.536.000,00	(65.761.220,00)	71,69
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-

KODE	U R A I A N	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI APBD TA. 2024	LEBIH/ KURANG	%
5 4	BELANJA TRANSFER	103.848.183.475,00	103.586.686.235,00	(261.497.240,00)	99,75
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	1.087.213.475,00	825.716.235,00	(261.497.240,00)	75,95
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	102.760.970.000,00	102.760.970.000,00	-	100,00
	SURPLUS/ DEFISIT	(41.866.256.139,91)	(4.751.604.670,70)	37.114.651.469,21	
6	PEMBIAYAAN				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.916.256.139,91	47.915.256.137,91	(1.000.002,00)	100,00
6 1 01	Penggunaan SILPA	47.866.256.139,91	47.866.256.139,91	-	100,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	48.999.998,00	(1.000.002,00)	98,00
				-	
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.050.000.000,00	6.000.000.000,00	(50.000.000,00)	99,17
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	100,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

KODE	U R A I A N	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI APBD TA. 2024	LEBIH/ KURANG	%
	PEMBIAYAAN NETTO	41.866.256.139,91	41.915.256.137,91	48.999.998,00	
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN	-	37.163.651.467,21		

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (Unaudited)



g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan.

Tabel 1.6
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1.	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	116.962.087.272	100.239.187.953
b.	Program	Pengelolaan Pendidikan	44.929.555.522	43.323.831.288
c.	Program	Pengembangan Kurikulum	194.730.000	194.579.000
d.	Program	Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan	279.999.500	270.384.500
2.	Kesehatan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	53.876.110.500	53.876.110.500
b.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.480.155.773	29.008.561.646
c.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.165.438.505	5.000.762.824
d.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	309.237.000	293.834.692
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.457.950.455	4.295.153.104

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
b.	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.197.393.520	8.746.094.386
c.	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.062.757.940	17.937.338.612
d.	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.408.702.167	9.139.140.830
e.	Program	Penataan Bangunan Gedung	120.000.000	88.923.000
f.	Program	Penyelenggaraan Jalan	71.079.893.333	70.775.797.230
g.	Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	255.000.000	208.925.610
h.	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.951.053.820	1.864.434.055
4.	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.224.26.402	3.941.931.299
b.	Program	Pemberdayaan Sosial	521.529.340	459.430.584
c.	Program	Rehabilitasi Sosial	581.020.060	579.962.057
d.	Program	Perlindungan dan Jaminan Sosial	158.000.000	147.535.835
e.	Program	Penanganan Bencana	200.000.000	193.367.750
f.	Program	Perlindungan Perempuan	150.371.000	147.227.000
g.	Program	Perlindungan Khusus Anak	211.534.500	169.713.500
h.	Program	Pemenuhan Hak Anak	267.355.000	228.119.027
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.323.406.249	2.055.753.419
b.	Program	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.944.888.340	1.930.630.468
c.	Program	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	15.270.000	15.270.000
6.	Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.911.602.825	11.814.516.678
b.	Program	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	227.959.120	227.263.010
c.	Program	Penempatan Tenaga Kerja	122.000.000	118.740.000
d.	Program	Hubungan Industrial	50.000.000	49.589.000
e.	Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	83.459.888
f.	Program	Pelayanan Penanaman Modal	119.999.900	114.616.100
g.	Program	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	194.340.000	176.724.762
h.	Program	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	49.999.000	49.884.000
i.	Program	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	125.192.000	123.427.740
7.	Pertanian dan Pangan			
a.	Program	Penunjang	7.889.149.412	7.501.134.302

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
b.	Program	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	11.817.500	11.797.500
c.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.766.990.500	2.766.564.125
d.	Program	Penyuluhan Pertanian	2.341.519.880	2.311.985.159
e.	Program	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	184.999.780	137.019.780
f.	Program	Penanganan Kerawanan Pangan	49.999.560	49.999.560
g.	Program	Pengawasan Keamanan Pangan	24.489.780	18.346.770
8.	Lingkungan Hidup			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.165.019.852	2.001.296.395
b.	Program	Perencanaan Lingkungan Hidup	499.995.600	492.997.552
c.	Program	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	293.199.000	292.815.667
d.	Program	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	28.000.000	27.965.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
e.	Program	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	99.999.800	99.619.504
f.	Program	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	398.368.840	386.106.950
g.	Program	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	80.000.000	79.978.000
h.	Program	Pengelolaan Sampah	304.081.500	283.405.500
9.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.578.900	442.763.013
b.	Program	Pendaftaran Penduduk	473.297.360	467.550.872
c.	Program	Pelayanan Pencatatan Sipil	95.000.000	94.563.980
d.	Program	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	380.000.000	370.127.870
e.	Program	Pengelolaan Profil Kependudukan	100.000.000	95.031.480
10.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
a.	Program	Penunjang Urusan	1.749.434.619	1.621.210.696

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Pemerintah Daerah		
b.	Program	Penataan Desa	51.365.400	51.365.400
c.	Program	Administrasi Pemerintahan Desa	711.460.825	710.514.905
d.	Program	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	482.995.000	482.791.900
11.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.847.830.599	1.663.505.225
b.	Program	Pembinaan Keluarga Berencana	2.654.034.840	1.938.983.877
c.	Program	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	715.800.000	700.909.792
12.	Perhubungan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.872.195.126	1.688.830.652
b.	Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	922.700.000	876.007.978
c.	Program	Pengelolaan Pelayaran	58.500.000	58.500.000
13.	Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian			
a.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.684.104.568	1.632.411.682

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
b.	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	607.382.280	602.758.270
c.	Program	Informasi Dan Komunikasi Publik	133.113.800	132.556.200
d.	Program	Aplikasi Informatika	443.165.780	442.487.236
e.	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	607.382.280	602.758.270
f.	Program	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	43.157.500	42.629.638
14.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.224.048.610	3.005.081.539
b.	Program	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	105.798.000	105.713.000
c.	Program	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro(UMKM)	109.945.000	108.395.000
d.	Program	Pengembangan UMKM	320.870.000	319.864.443
e.	Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri	151.785.000	143.660.900
f.	Program	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	280.400.000	280.400.000
g.	Program	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	50.000.000	49.990.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
h.	Program	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.111.690.500	1.095.596.000
i.	Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri	100.000.000	99.939.650
15.	Perpustakaan Dan Kearsipan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2.608.847.250	2.493.140.739
b.	Program	Pembinaan Perpustakaan	986.963.580	986..963.580
c.	Program	Pengelolaan Arsip	166.339.500	166.339.500
16.	Perikanan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	2.237.621.092	2.198.902.729
b.	Program	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.082.839.250	1.082.666.450
c.	Program	Pengelolaa Perikanan Budidaya	3.922.630.200	3.922.630.200
17.	Pariwisata Dan Kebudayaan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	2.276.296.805	2.063.043.851
b.	Program	Pengembangan Kebudayaan	362.979.560	362.559.460
c.	Program	Pengembangan Kesenian Tradisional	400.000.000	324.457.860
d.	Program	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	80.000.000	79.967.150
e.	Program	Peningkatan Daya Tarik	390.830.000	390.798.945

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Destinasi Pariwisata		
f.	Program	Pemasaran Pariwisata	529.520.000	529.150.800
g.	Program	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	312.107.560	304.418.060
18.	Peternakan			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.003.688.246	3.891.632.624
b.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	558.012.360	547.941.907
c.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.880.058.060	3.880.027.678
d.	Program	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	736.463.560	694.084.719
19.	Sekretariat Daerah			
A.	Bagian Pemerintahan			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.800.000	248.336.115
b)	Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	498.280.000	490.931.016
B.	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.645.000	124.063.552
b)	Program	Pemerintahan	6.888.102.235	6.271.305.211

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		dan Kesejahteraan Rakyat		
C.	Bagian Hukum			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.400.000	153.179.046
b)	Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	588.385.000	515.239.370
D.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.300.000	135.245.417
b)	Program	Perekonomian dan Pembangunan	962.818.979	950.952.979
E.	Bagian Administrasi Pembangunan			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.581.000	126.768.040
b)	Program	Perekonomian dan Pembangunan	1.268.243.500	934.683.536
F.	Bagian Umum			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	14.961.718.069	14.022.776.053
G.	Bagian Organisasi			
a)	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	457.333.000	445.359.512
H.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
a)	Program	Penunjang	564.187.000	542.858.990

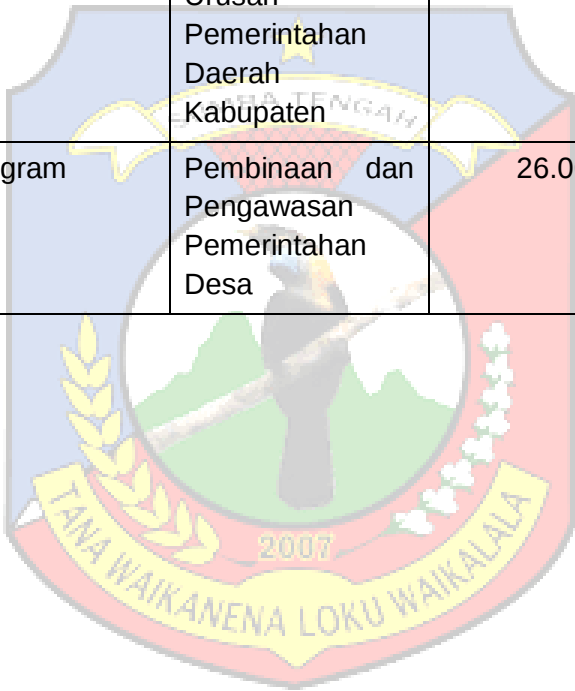
No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
20.	Sekretariat DPRD			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	11.248.828.475	11.137.498.856
b.	Program	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.604.648.000	4.603.630.758
21.	Inspektorat			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.758.783.982	2.621.877.169
b.	Program	Penyelenggaraan Pengawasan	1.031.898.000	1.031.705.822
c.	Program	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	620.750.000	620.529.788
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.701.217.316	1.577.321.927
b.	Program	Penanggulangan Bencana	1.388.242.700	1.348.546.400
23.	Badan Keuangan Daerah			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.748.242.716	3.968.710.936
b.	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	3.435.851.000	3.412.965.334
c.	Program	Pengelolaan	722.683.500	705.418.586

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Barang Milik Daerah		
d.	Program	Pengelolaan Pendapatan	611.827.560	606.518.114
24.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.309.869.049	2.192.335.678
b.	Program	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.498.619.600	1.482.514.796
c.	Program	Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.017.193.500	1.001.338.218
d.	Program	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.080.836.700	1.045.350.111
e.	Program	Penelitian Dan Pembangunan Daerah	100.000.000	98.633.605
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.352.445.180	5.392.560.381
b.	Program	Kepegawaian Daerah	1.973.818.500	1.872.108.711
c.	Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.138.285.560	2.885.865.873
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintah	1.845.032.275	1.736.339.485

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Daerah Kabupaten		
b.	Program	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1.412.502.356	1.351.464.100
c.	Program	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	22.289.818.075	22.240.192.773
d.	Program	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	346.820.000	345.827.000
27.	Kecamatan Katikutana			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	320.185.420	315.534..420
b.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.759.560	114.219.100
c.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	41.500.000	41.500.000
d.	Program	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	106.124.560	106.049.560
e.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.000.000	49.000.000
f.	Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.835.500	98.835.500
28.	Kecamatan Katikutana Selatan			

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.461.790.696	1.352.819.456
b.	Program	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	50.000.000	49.985.000
c.	Program	Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	155.510.100	155.460.000
29.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.138.548.594	1.034.821.366
b.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	87.020.000	87.005.000
c.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	145.784.000	145.764.000
d.	Program	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	58.864.000	58.839.850
30.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.288.798.633	1.260.143.687
b.	Program	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	284.975.000	284.975.000
c.	Program	Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	85.000.000	85.000.000
31.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	1.280.502.172	1.154.525.153

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
		Daerah Kabupaten		
b.	Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.530.500	52.530.500
c.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000	75.000.000
32.	Kecamatan Mambo			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.920.073.950	1.720.514.709
b.	Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.000.000	26.000.000



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1) Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang telah diungkapkan dalam gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, meliputi:

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- a. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Tengah yang relatif rendah dengan capaian pertumbuhan PDRB atas harga berlaku yang hanya 10,62%
- b. PDRB per kapita penduduk Sumba Tengah yang rendah hanya mencapai Rp13,17 juta.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sebesar 4,82%.
- d. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah di bawah garis kemiskinan yang relatif tinggi sebesar 36,4%.
- e. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumba Tengah sebesar 63,13.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

- a. Angka melek huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang relatif rendah sebesar 39,74%
- b. Angka rata-rata lama sekolah yang rendah sebesar 5,21 tahun
- c. Balita Gizi Buruk yang relatif besar mencapai 2,49% dari bayi lahir.
- d. Partisipasi angkatan kerja (Berumur 15 Tahun Keatas)
- e. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang relatif tinggi sebesar 96,86 dari keseluruhan keluarga.

- f. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten yang hanya sebesar 4,09% dari total pendapatan daerah.
 - g. Produksi Padi dan Palawija serta Perkebunan yang relatif rendah.
3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga

Belum terbentuknya grup kesenian, grup olah raga dan belum adanya Gedung olah raga.

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib

a) Pendidikan

- a. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hanya mencapai 48,14%.
- b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B yang berada di bawah
- c. 90%
- d. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs.
- e. Rendahnya cakupan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV hanya sebesar 51,28%.

b) Kesehatan

- a. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang belum memadai antara lain rumah bersalin dan Posyandu.
- b. Rasio Tenaga Kesehatan yang relatif rendah sebesar 6,62.
- c. Rasio Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang relative rendah sebesar 0,27.
- d. Rendahnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 65,22% dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 78,52%
- e. Rendahnya cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 61,54%.
- f. Rendahnya cakupan kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan sebesar 73,79%.
- g. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang hanya mencapai 15,33%.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rendahnya persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik yang hanya mencapai 29,7%
 - b. Cakupan sawah beririgasi yang relatif rendah hanya 36,1%.
 - c. Rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yang hanya mencapai 10,2%.
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Masih rendahnya cakupan rumah berkualitas
 - b. Rendahnya cakupan fasilitas rumah, meliputi : penerangan listrik (59,27%), air ledeng (0%), rumah dengan akses air bersih (69,16%) dan rumah berjambran dengan septi tank (5,97%).
- e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Rendahnya rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja (0,3) dan Petugas Linmas 18,68.
- f) Sosial
- a. Rendahnya cakupan Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial sebesar 30%.
 - b. Rendahnya cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 73,97%.
- g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 28,6%.
 - b. Belum adanya keanggotaan DPRD yang diduduki perempuan.
 - c. Belum tercapainya partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 18,1%
 - d. KDRT yang relatif tinggi dengan rasio 0,21.
 - e. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun yang rendah 0,58.
- h) Pertanahan
- Belum terdatanya lahan bersertifikat

i) Lingkungan Hidup

Belum tersedianya dokumen bidang lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, meliputi : RPPLH yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kabupaten, KLHS, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan, Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten, Pendampingan Pengakuan MHA dan terverifikasinya MHA serta kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penetapan hak MHA.

j) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belum terpenuhinya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 87,27%.

k) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Rendahnya cakupan akseptor KB sebesar 38,8%.
- b. Rendahnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun sebesar 42%.
- c. Rendahnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 1,7%.
- d. Tingginya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 10,3%.
- e. Rendahnya persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 47,3%.
- f. Rendahnya persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebesar 57,8%.
- g. Rendahnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70,6%), anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (54,5%), anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (96,6%).

l) Perhubungan

- a. Rendahnya jumlah arus penumpang angkutan umum yang mengindikasikan belum seluruh masyarakat terjangkau angkutan umum.
- b. Rendahnya jumlah uji Kir angkutan umum sebanyak 165 unit.

- c. Rendahnya rasio ijin trayek (0,0001) dan persentase layanan angkutan darat (2,6% yang mengindikasikan angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.
- m) Komunikasi dan Informatika
 - Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
- n) Penanaman Modal
 - Belum adanya investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi di Kabupaten Sumba Tengah.
- o) Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Belum terpenuhinya cakupan organisasi pemuda yang aktif (80%).
 - b. Belum terpenuhinya cakupan wirausaha muda (81,3%).
 - c. Rendahnya cakupan pembinaan olah raga (45,5%).
 - d. Rendahnya cakupan Pelatih yang bersertifikasi (35%).
 - e. Rendahnya cakupan pembinaan atlet muda (20%).
- p) Persandian
 - Belum adanya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.
- q) Kebudayaan
 - a. Rendahnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi sebesar 1 karya.
 - b. Rendahnya cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 24,1%.
- r) Perpustakaan
 - Belum terdatanya koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.
- s) Kearsipan
 - a. Pengelolaan mengelola arsip secara baku belum dilaksanakan Perangkat Daerah.
 - b. Belum adanya kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan lingkup Pemerintah Daerah.

2. Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

- a. Rendahnya produksi perikanan yang hanya mencapai 138,4 Ton.
- b. Rendahnya cakupan bina kelompok nelayan sebesar 31,1%.

b) Pariwisata

Belum terpenuhinya target kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumba Tengah yang hanya mencapai 5.300 orang.

c) Pertanian

- a. Rendahnya cakupan pembinaan terhadap kelompok petani sebesar 32,8%.
- b. Rendahnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang hanya mencapai 0,6 ton/ha.

d) Perdagangan

- a. Belum terpenuhinya jumlah perusahaan dan pedagang di wilayah Kabupaten.
- b. Rendahnya jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten.

e) Perindustrian

- a. Rendahnya jumlah Perusahaan industri dan tenaga kerja.
- b. Rendahnya jumlah tenaga kerja di bidang industri.

3. Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Keuangan

- a. Persentase Belanja tidak langsung yang relatif tinggi sebesar 40,7%.
- b. Persentase Belanja langsung yang relatif rendah 59,3%.
- c. Persentase SILPA terhadap APBD yang relatif tinggi sebesar 5,5%.
- d. Opini BPK terhadap laporan keuangan belum mencapai WTP.

b) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Rendahnya cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 4%.
- b. Rendahnya cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 5,3%.
- c. Belum adanya pengangkatan ASN ke dalam jabatan fungsional.

c) Penelitian dan pengembangan

Belum dimanfaatkannya hasil Kelitbangan oleh Pemerintah Daerah.

d) Pengawasan

Rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK sebesar 14,9%

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Rendahnya persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan perbulan.
2. Rendahnya persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan perbulan.
3. Rendahnya angka kriminalitas yang tertangani sebesar 12,67%.

b) Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Kabupaten Sumba Tengah yang ingin diwujudkan pada akhir periode 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen transisi, menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUMBA TENGAH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN”

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Sumba Tengah diuraikan sebagai berikut:

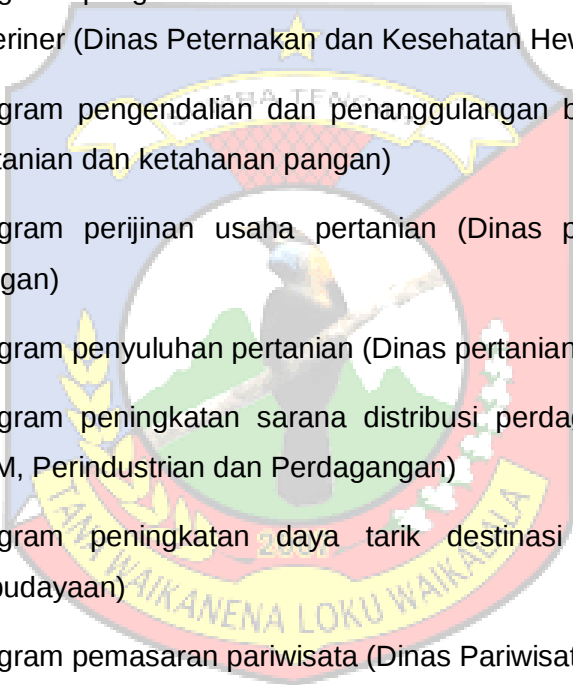
- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Sumba Tengah yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing dengan menjamin pencapaian hasil pembangunan yang berkeadilan;
- 3) Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- 4) Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung oleh sistem politik yang demokratis;
- 5) Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum;
- 6) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang;
- 7) Mewujudkan peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat secara lebih baik dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial.

c) Program pembangunan daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Adapun Program pembangunan daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, meliputi:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah (seluruh PD)
2. Program pengelolaan pendidikan (Dinas PPO)
3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)
4. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (Dinas PUPR)
5. Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah (Dinas PUPR)
6. Program pengembangan perumahan (Dinas PUPR)
7. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran)
8. Program penanggulangan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
9. Program Rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah)
11. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
12. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan)
13. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan)
14. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan)
15. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Bagian Kesejahteraan Sosial)
16. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (Dinas Kesehatan)
17. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)
18. Program penyelenggaraan jalan (Dinas PUPR)

19. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Dinas Perhubungan)
20. Program pengelolaan sumber daya air (Dinas PUPR)
21. Program perencanaan lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
22. Program kawasan permukiman (Dinas PUPR)
23. Program perlindungan dan jaminan sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
24. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan (Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
25. Program perlindungan perempuan (Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
26. Program peningkatan kualitas keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
27. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Dinas Pendidikan dan Olah Raga)
28. Program pengembangan kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
29. Program pengembangan kesenian tradisional (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
30. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
31. Program pemberdayaan usaha kecil dan usaha mikro (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)
32. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja (Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja, Penanaman modal dan PTSP)
33. Program pengelolaan perikanan tangkap (Dinas Perikanan)
34. Program pengelolaan perikanan budidaya (Dinas Perikanan)
35. Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Dinas Pariwisata & Kebudayaan)
36. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan)
37. Program pembangunan kawasan transmigrasi (Dinas transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal dan PTSP)

- 
38. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan)
 39. Program penempatan tenaga kerja (Dinas transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal dan PTSP)
 40. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Dinas Perikanan)
 41. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dinas Perikanan)
 42. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dinas pertanian dan ketahanan pangan)
 43. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Dinas pertanian dan ketahanan pangan)
 44. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)
 45. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas pertanian dan ketahanan pangan)
 46. Program perijinan usaha pertanian (Dinas pertanian dan ketahanan pangan)
 47. Program penyuluhan pertanian (Dinas pertanian dan ketahanan pangan)
 48. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)
 49. Program peningkatan daya tarik destinasi (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
 50. Program pemasaran pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
 51. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
 52. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
 53. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

d) Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan tahunan

Adapun kegiatan pembangunan daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan tahunan, meliputi:

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 5) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Keuangan
- 7) Administrasi Umum
- 8) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 9) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

2. BAPELITBANGDA

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
- 3) Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
- 4) Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
- 5) Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
- 6) Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
- 7) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Administrasi Keuangan
- 9) Administrasi Umum

10) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

11) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

12) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

1) Pengelolaan Data dan Informasi ASN

2) Administrasi Kepegawaian

3) Peningkatan Kapasitas ASN

4) Pengembangan Karir ASN

5) Pembinaan ASN

6) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7) Administrasi Keuangan

8) Administrasi Umum

9) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2) Pelayanan Pencatatan Sipil

3) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

4) Penataan Administrasi Kependudukan

5) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

6) Penyusunan Profil Kependudukan

7) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8) Administrasi Keuangan

9) Administrasi Umum

5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1) Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 5) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- 9) Pengelolaan Sampah
- 10) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 11) Administrasi Keuangan
- 12) Administrasi Umum
- 13) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 4) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 9) Administrasi Keuangan
- 10) Administrasi Umum
- 11) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 12) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 13) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 14) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 15) Penerbitan Izin Membuka Tanah

7. UPTD PENGOLAHAN AIR MINUM

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 5) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Keuangan

7) Administrasi Umum

8) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

3) Administrasi Umum

4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

5) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

6) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

7) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

8) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

9) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

4) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5) Administrasi Keuangan

6) Administrasi Umum

7) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- 8) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- 9) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

11. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 4) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 9) Administrasi Keuangan
- 10) Administrasi Umum
- 11) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 12) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 13) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 14) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

15) Penerbitan Izin Membuka Tanah

12. SATPOL PP

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- 3) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 5) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Keuangan
- 7) Administrasi Umum
- 8) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Keuangan
- 6) Administrasi Umum
- 7) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

14. DINAS KESEHATAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 12) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 14) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 15) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

15. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- 8) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- 11) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- 12) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 17) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 19) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 20) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 21) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 22) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

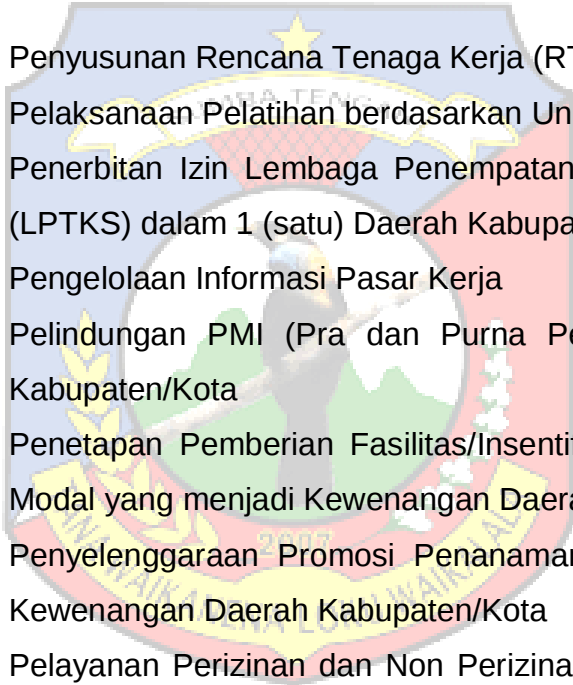
16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyelenggaraan Penataan Desa
- 8) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 9) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 10) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

17. DINAS PERHUBUNGAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

10. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 13. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 14. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 15. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
18. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL

- 
- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 2) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 3) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 5) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 7) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 9) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 10) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 11) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 12) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 14) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

19. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 3) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 4) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- 5) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- 6) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- 7) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 8) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 10) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 11) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 15) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- 16) Pengembangan Prasarana Pertanian
- 17) Pembangunan Prasarana Pertanian
- 18) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- 19) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

20. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 7) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- 10) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- 11) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 12) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- 13) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 14) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

21. DINAS PERIKANAN

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 7) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- 9) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- 10) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- 11) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- 12) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 13) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

22. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 8) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 9) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 11) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 12) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 13) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 14) Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
- 15) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

23. DINAS PETERNAKAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- 8) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 11) Pembangunan Prasarana Pertanian
- 12) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

24. UPTD PEMBIBITAN DAN AGRIBISNIS TERNAK

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 7) Pembangunan Prasarana Pertanian

25. BADAN KEUANGAN DAERAH

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 7) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 8) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 9) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 11) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

26. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- 8) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

27. BAGIAN PEREKONOMIAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 8) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

28. BAGIAN UMUM

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 9) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

29. BAGIAN HUKUM

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Fasilitas dan Koordinasi Hukum

30. BAGIAN PEMERINTAHAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Administrasi Tata Pemerintahan

31. BAGIAN ORGANISASI

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penataan Organisasi

32. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

33. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

34. INSPEKTORAT

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 7) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- 8) Pendampingan dan Asistensi

35. BADAN KESBANGPOL

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- 11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 12) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 13) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

36. PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 9) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 10) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 11) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 14) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 15) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 17) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- 18) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

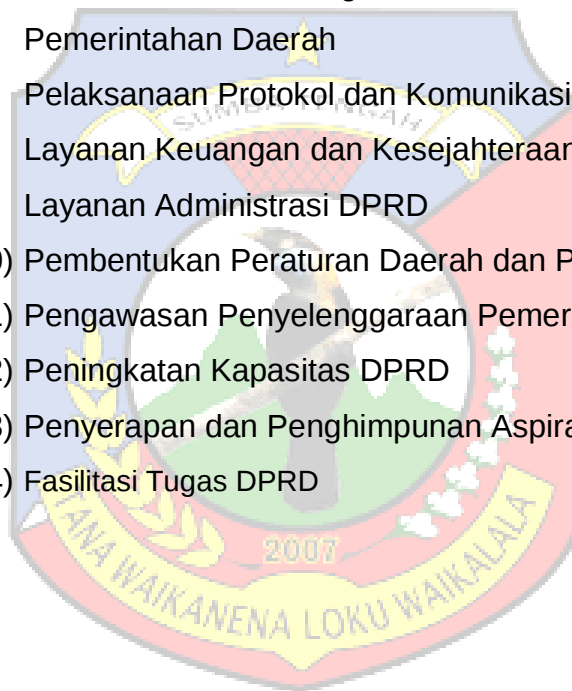
37. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 7) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

38. SEKWAN

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 9) Layanan Administrasi DPRD
- 10) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 11) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 12) Peningkatan Kapasitas DPRD
- 13) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 14) Fasilitasi Tugas DPRD



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024 merujuk pada mekanisme yang telah diatur oleh masing-masing Urusan Pemerintahan. Penyusunan Laporan SPM tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar, yang meliputi:

1. Urusan Pendidikan, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan, merujuk peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Bidang sosial, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka memastikan Penerapan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Sumba Tengah, telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal melalui Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: KEP/HK/234/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian Kinerja Makro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	63,63%	64,46%	1,304%
2.	Angka Kemiskinan	31,78%	30,84%	-2,958%
3	Angka Pengangguran	1,89%	1,89%	0%
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,85%	3,71%	30.175%
5	Pendapatan Per kapita (PDRB ADHB)	15.443.000	16.536.000	7,078%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,327*	0,327*	0%

Sumber: Badan Pusat Statisti Kab. Sumba Tengah Tahun 2025

Ket: * Data Tahun 2020

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	69 PAUD	Dinas PPO	
		2. Jumlah Peserta didik PAUD (Negeri dan Swatsa) yang menerima	0 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3. Jumlah Peserta didik PAUD (Negeri dan Swatsa) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	3.298 orang	Dinas PPO	
		4. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	300 orang	Dinas PPO	
		5. Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.092 orang	Dinas PPO	
		6. Jumlah Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, Kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	353 orang	Dinas PPO	
		7. Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1, Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD	0 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah			
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	51 SD dan SMP	Dinas PPO	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.795 orang	Dinas PPO	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.892 orang	Dinas PPO	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	8.795 orang	Dinas PPO	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.795 orang	Dinas PPO	
		13. Jumlah kebutuhan	951 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	575 orang	Dinas PPO	
		15. Jumlah Pendidik pada jenjang sekolah dasar	951 orang	Dinas PPO	
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	550 orang	Dinas PPO	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	264 orang	Dinas PPO	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	490 orang	Dinas PPO	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	245 orang	Dinas PPO	
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	136 orang	Dinas PPO	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	890 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik			
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	550 orang	Dinas PPO	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	88 orang	Dinas PPO	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	34 orang	Dinas PPO	
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki	0 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		ijazah SMA/ sederajat			
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	88 orang	Dinas PPO	
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3	Dinas PPO	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah daerah	0 orang	Dinas PPO	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	334 orang	Dinas PPO	
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	60 orang	Dinas PPO	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	43 orang	Dinas PPO	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta) yang	41 orang	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
		33. Jumlah Kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikasi pendidik dan surat tanda tamat pendidikan calon kepala sekolah	1 orang	Dinas PPO	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3 orang	Dinas PPO	
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang tersedia	532 orang	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5. Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	532 orang	Dinas Kesehatan	
		7. Jumlah dukungan logistik Untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.614 orang	Dinas Kesehatan	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk pelayanan balita yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.686 orang	Dinas Kesehatan	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk usia Pendidikan dasar yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.614 orang	Dinas Kesehatan	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk usia produktif	1 Paket	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang tersedia			
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	560 orang	Dinas Kesehatan	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk usia lanjut yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	560 orang	Dinas Kesehatan	
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk hipertensi yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	584 orang	Dinas Kesehatan	
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	616 orang	Dinas Kesehatan	
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang	Dinas Kesehatan	
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	421 Orang	Dinas Kesehatan	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinas Kesehatan	
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	562 Orang	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten			
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		8. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		9. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		10. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		11. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangan Kabupaten (m)			
		12. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		13. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		14. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		15. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$46.676/62.399 \times 100\% = 74,80\%$	Dinas PUPR	
		16. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$9.033/11.687 \times 100\% = 77,29\%$	Dinas PUPR	
		17. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$331/885 \times 100\% = 37,40\%$	Dinas PUPR	
		18. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	Ada	Dinas PUPR	
		19. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Tidak	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaraan SPAM	1 UPTD	Dinas PUPR	
		21. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Belum ada	Dinas PUPR	
		22. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Belum ada	Dinas PUPR	
		23. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	551 Unit	Dinas PUPR	
		24. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada	Dinas PUPR	
		25. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		menggunakan SPALD S dan SPALD T			
		26. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada	Dinas PUPR	
		27. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada	Dinas PUPR	
		28. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	Tidak ada	Dinas PUPR	
		29. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0%	Dinas PUPR	
		30. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0%	Dinas PUPR	
		31. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0%	Dinas PUPR	
		32. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0%	Dinas PUPR	
		33. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
		34. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
		35. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke	0%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		IPALD			
		36. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
		37. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0%	Dinas PUPR	
		38. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	Tidak ada	Dinas PUPR	
		39. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	Dinas PUPR	
		40. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR	
		41. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		42. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		43. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah	477	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kabupaten			
		44. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	Tidak ada	Dinas PUPR	
		45. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten	811,53 km	Dinas PUPR	
		46. Panjang jalan yang dibangun	4 km	Dinas PUPR	
		47. Panjang jembatan yg dibangun	7 m	Dinas PUPR	
		48. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	25,885 km	Dinas PUPR	
		49. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		50. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	25,885 Km	Dinas PUPR	
		51. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 km	Dinas PUPR	
		52. Panjang jalan yang dipelihara	1.825 km	Dinas PUPR	
		53. Panjang jembatan yang dipelihara	6 m	Dinas PUPR	
		54. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		55. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		wilayah Kabupaten			
		56. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten	27 orang	Dinas PUPR	
		57. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR	
		58. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		59. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Dinas PUPR	
		60. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		61. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		62. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten	Ada	Dinas PUPR	
		63. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Dinas PUPR	
		64. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		teknisi/analisis			
		65. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten	Ada	Dinas PUPR	
		66. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		67. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Dinas PUPR	
		68. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		69. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		70. Tersedianya data dan	Tidak ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		PUPR	
		71. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten	Ada	Dinas PUPR	
		72. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		73. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		74. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Tidak ada	Dinas PUPR	
		75. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Dinas PUPR	
		76. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		77. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		78. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
4.	Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Belum Terdata	Dinas PUPR	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak ada	Dinas PUPR	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		5. Jumlah unit rumah	Tidak ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		PUPR	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	Dinas PUPR	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	
		12. Jumlah rumah tangga	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	6.168 unit	Dinas PUPR	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada	Dinas PUPR	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Tidak ada	Dinas PUPR	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak ada	Dinas PUPR	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak ada	Dinas PUPR	
		19. Jumlah rumah di Kabupaten	15.772	Dinas PUPR	
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	6.168 unit	Dinas PUPR	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada	Dinas PUPR	
		23. Rasio rumah dan KK	Tidak ada	Dinas PUPR	
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak ada	Dinas PUPR	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Tidak ada	Dinas PUPR	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	11.832 unit	Dinas PUPR	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	9.864 unit	Dinas PUPR	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Belum ada	Dinas PUPR	
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	9.864 unit	Dinas PUPR	
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Belum ada	Dinas PUPR	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Belum ada	Dinas PUPR	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Belum ada	Dinas PUPR	
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam	84 Kasus	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	perlindungan masyarakat	Kabupaten yang ditangani			
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.300 orang	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5 SOP	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	5 Sarpras	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%	BPBD	
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	250	BPBD	
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%	BPBD	
		10. Persentase penyelesaian	0%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			
		11. Persentase jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	0%	BPBD	
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0%	BPBD	
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0%	BPBD	
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	BPBD	
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	BPBD	
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	BPBD	
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari,	100%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten	Tidak ada	BPBD	
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada	BPBD	
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada	BPBD	
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada	BPBD	
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan	26	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		evakuasi			
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Tidak ada	BPBD	
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak ada	BPBD	
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak ada	BPBD	
6.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	0	Dinas Sosial, PPPA	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	352	Dinas Sosial, PPPA	
		3. Jumlah Tim Reaksi	0	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Cepat yang dibentuk		Sosial, PPPA	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0	Dinas Sosial, PPPA	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinas Sosial, PPPA	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	25 orang Lansia, 58 orang penyandang Disabilitas	Dinas Sosial, PPPA	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial, PPPA	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial, PPPA	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	0	Dinas Sosial, PPPA	Berita Acara Penyerahan dan Dokumen Foto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memanfaatkan alat bantu			
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Belum ada	Dinas Sosial, PPPA	
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Belum ada	Dinas Sosial, PPPA	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Belum ada	Dinas Sosial, PPPA	
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Belum ada	Dinas Sosial, PPPA	
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0	Dinas Sosial, PPPA	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Dinas Sosial, PPPA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial, PPPA	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial, PPPA	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinas Sosial, PPPA	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial, PPPA	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial, PPPA	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	0	Dinas Sosial,	SK Penerima Manfaat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		PPPA	
		22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	39	Dinas Sosial, PPPA	Nama-nama Penerima Manfaat, Dokumen Foto dan Berita Acara Penyerahan
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial, PPPA	
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial, PPPA	
		25. Jumlah paket makanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial, PPPA	
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial, PPPA	
		27. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0	Dinas Sosial, PPPA	
7.	Ketenagakerjaan	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator	Belum ada	Dinas Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam rencana tenaga kerja		si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKN atau okupasi pada tahun 2024 Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2024 Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2024	Dinas Transmigrasi, Tenaga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah seluruh LPK pada tahun 2024 X 100% 0%	Kerja, PM dan PTSP	
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2024 Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2024 Jumlah lulusan pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		11. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2024 Jumlah lulusan tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2024	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			X 100% 0%		
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 orang	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 orang	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2024 Jumlah perusahaan pada tahun 2024 X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		16. Data tingkat produktivitas total	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2024 Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		18. Persentase perusahaan yang	Jumlah perusahaan yang telah memiliki	Dinas Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	PKB pada tahun 2024 Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB X 100% 0%	si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan	Dinas Transmigrasi, Tenaga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			pada tahun 2024 X 100% 0%	Kerja, PM dan PTSP	
		23. Jumlah mogok kerja	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		27. Jumlah perselisihan PHK	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian Bersama Jumlah kasus perselisihan X 100% 0%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten	34 orang pencari kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		37. Jumlah Lembaga	Belum ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten		Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Belum ada	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Belum ada	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	24 orang	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Belum ada	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan	22 orang	Dinas Transmigra si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pendidikan dan pelatihan kerja			
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG	0	Dinas Sosial, PPPA	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten	0	Dinas Sosial, PPPA	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Sosial, PPPA	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang	6 Lembaga yang terdiri dari 1.LPA	Dinas Sosial,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		telah memiliki standar pelayanan minimal	2.KPA 3.LSM SAVE THE CHILDR 4. YAYASAN WAHANA KOMUNIKASI WANITA 5. FOREMBA 6.PPA	PPPA	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Korban kekerasan anak yang dilayani Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten $\times 100\%$ 23 / 29.636 x 100% = 0,077%	Dinas Sosial, PPPA	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4 Lembaga	Dinas Sosial, PPPA	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten)	0	Dinas Sosial, PPPA	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	4 organisasi	Dinas Sosial, PPPA	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten yang sudah dilatih	0	Dinas Sosial, PPPA	
		10. Jumlah lembaga layanan	0	Dinas Sosial,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		PPPA	
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten	0	Dinas Sosial, PPPA	
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0 program	Dinas Sosial, PPPA	
		13. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0	Dinas Sosial, PPPA	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan X 100% 37 / 44.084 x 100% 83,93%	Dinas Sosial, PPPA	
9.	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan	2 unit bangunan RMU dan 2 unit RMU	Dinas Pertanian dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Ketahanan Pangan	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada penyaluran pangan pokok kepada kelompok tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Tidak Ada regulasi harga minimum daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan segar
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada penanganan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Keterbatasan Anggaran
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada penyaluran cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Keterbatasan anggaran
		8. Terlaksananya	Ada kegiatan	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengawasan keamanan pangan segar	pengawasan keamanan pangan segar	Pertanian dan Ketahanan Pangan	
10.	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	Belum ada		
		2. SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Belum ada		
		3. SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Belum ada		
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Belum ada		
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	Belum ada		
11.	Lingkungan hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. Indeks kualitas air (IKA) 50% = 56,57 b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 91,86 c. Indeks tutupan hutan (ITH) = 52,1	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap	Dinas Lingkungan Hidup	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terlampir

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		
		3. Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Dearah Kabupaten Sumba Tengah	SPPL dan UKL-UPL Jumlah permohonan yang teregistrasi $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Sumba Tengah terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	3 Pejabat Fungsional	Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Penetapan HAK MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten Sumba Tengah	Jumlah MHA yang diakui $\frac{\text{Jumlah usulan MHA}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\% = 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Masih dalam tahapan identifikasi kelompok MHA
		6. Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan $\frac{\text{Jumlah MHA yang ada}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 0%		
		7. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup	
		8. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Lokasi dan Usaha dampaknya di Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang ditangani	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan $\frac{11.771}{34.553} \times 100\% = 34\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan Peristiwa perceraian yang dilaporkan $\frac{21}{126} \times 100\% = 17\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa kematian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$X 100\%$ $3.249 / 3.277 \times 100\%$ $= 100\%$	Sipil	
		4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun 2 tahun $\times 100\%$ $12 / 24 \times 100\% = 50\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa untuk pengentasan desa tertinggal	33 desa	Dinas PMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	23 desa	Dinas PMD	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2 Lembaga	Dinas PMD	BPD, PKK dan Posyandu
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan	2 Lembaga	Dinas PMD	Lembaga BUMDes dan PKK

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemberdayaan			
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa untuk peningkatan status desa mandiri	10 desa	Dinas PMD	
		6. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	10 desa	Dinas PMD	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2 lembaga	Dinas PMD	
		8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2 lembaga	Dinas PMD	
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Trend Usia kawin Pertama di umur 20-	Dinas Pengendalian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29 tahun sebanyak 9.554	an Penduduk dan KB	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) X 100% 0 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 stakeholder	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah Faskes X 100% 11 / 11 x 100% = 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah peserta KB aktif Jumlah PUS	Dinas Pengendalian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang (MKJP)	$X 100\%$ $5.021 / 10.605 \times 100\%$ $= 47,35\%$	Penduduk dan KB	
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif adalah 12 kelompok kerja	Dinas Pengendalian dan Penduduk dan KB	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern $\frac{\text{Jumlah sasaran peserta KB paska persalinan}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB paska persalinan}} \times 100\%$ $28 / 30 \times 100\%$ $= 93\%$	Dinas Pengendalian dan Penduduk dan KB	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	0%	Dinas Pengendalian dan Penduduk dan KB	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ $3.489 / 3.893 \times 100\%$ $= 89,62\%$	Dinas Pengendalian dan Penduduk dan KB	
15.	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Belum ada	Dinas Perhubungan	
		2. Terlaksananya	Belum ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan Jumlah lintas penyebrangan dalam Kabupaten $X 100\%$ 0 / 0 x 100% = 0% Belum ada	Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah, X 100% 0 / 32 x 100% = 0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo.	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$X 100\%$ $0 / 32 \times 100\% = 0\%$		
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 	Ya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah tersedi berupa Website, Whatsup, Youtube, Facebook. Berdasarkan: -Edaran MENKOMINF O Nomor 3 tahun 2016, Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ Konten Melalui Internet -UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
		4. Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, X 100% 32 / 32 x 100% = 100%		
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar, Jumlah Perangkat Daerah X 100% 3 / 32 x 100% = 9,37%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah Perangkat Daerah X 100% 32 / 32 x 100% = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		secara elektronik	Jumlah layanan X 100% 0 / 0 x 100% = 0%		
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0 / 0 x 100% = 0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan X 100% 34 / 34 x 100% = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan X 100% 0 / 0 x 100% = 0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan X 100% 32 / 32 x 100% =	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			100%		
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $1 / 32 \times 100\% = 10\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$1 / 32 \times 100\% = 10\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$39 / 39 \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo	$1 / 1 \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		17. Tersedianya peraturan daerah peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perbub Nomor 21 Tahun 2021, Tentang pengelolaan Porta Data Pemerintah Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Sumba Tengah
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0 / 0 x 100% = 0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penjelasan
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sda
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam X 100% 0 / 82 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah Kabupaten	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan $\times 100\%$ 0 / 82 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	sda
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada $\times 100\%$ 47 / 82 x 100% = 57,3%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	Dokumen Terlampir
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada $\times 100\%$ 5 / 47 x 100% = 10,6%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah Koperasi mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam daerah Kabupaten	X 100% 0 / 0 x 100% = 0%		
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah Anggota koperasi yang ada X 100% 0 / 54 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada X 100% 0 / 0 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) Jumlah koperasi yang ada X 100% 0/43 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Jumlah koperasi yang ada X 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam daerah Kabupaten	$0 / 82 \times 100\% = 0\%$		
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $0 / 82 \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $47 \text{ Koperasi} / 82 \times 100\% = 57,32\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	Dok. terlampir
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $0 / 82 \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru $\frac{\text{Jumlah wirausaha yang ada}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $504 / 1.985 \times 100\% = 25,39\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online $\frac{\text{Jumlah usaha mikro}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		system (ODS)	yang ada X 100% 504 / 1985 x 100% = 25,39%		
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang ada X 100% 146 / 1.985 x 100% = 7,36%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk X 100% 0/ 1.985 x 100% = 0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran X 100% 25 / 1.985 x 100% = 1,26%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha mikro yang ada	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$X 100\%$ $100 / 1.985 \times 100\% = 5,04\%$		
		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $165 / 1.985 \times 100\% = 8,31\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
18.	Penanaman modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 kegiatan	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	Sasaran 6 Kecamatan
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Belum ada	Dinas Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				si, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	366	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	366	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	NIB: 218 Ijin Penelitian: 46 PBG: 16 Sertifikat Standar 40 KKPR 6
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau adalah Rp. 253.591.150.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten	7 orang aparatur	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	53 Perusahaan	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan	Ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		provinsi Kabupaten		Kerja, PM dan PTSP	
19.	Kepemudaan dan olah raga	1. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas PPO	
		2. Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas PPO	
		3. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, Kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas PPO	
		4. Jumlah pengelola Organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas PPO	
		5. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	15	Dinas PPO	
		6. Jumlah Penyelenggaran event OR prestasi tingkatn daerah	0	Dinas PPO	
20.	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Tidak	Diskominfo	Kegiatan penyusunan buku profil daerah di laksanakan oleh Bappelitbang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					da.
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak	Diskominfo	Diskominfo Kabupaten Sumba Tengah tidak melaksanakan Survei, tetapi kompilasi produk administrasi
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah dokumen kompilasi data statistik sektoral 2 dokumen	Diskominfo	Judul: Buku Induk Statistik Sektoral tahun 2022 dan Buku Kompilasi Metadata Sektoral tahun 2022
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Diskominfo	Diskominfo Kabupaten Sumba Tengah tidak melaksanakan Survei
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah dokumen kompilasi data statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 2 dokumen	Diskominfo	Judul: Buku Induk Statistik Sektoral tahun 2022 dan Buku Kompilasi Metadata Sektoral tahun 2022
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan	Jumlah kegiatan pengumpulan/pengisian format metadata (1	Diskominfo	Kompilasi Metadata Sektoral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		statistik sektoral	kegiatan)		tahun 2022
		7. Persentase kelengkapan metadata variable sectoral	Tidak ada	Diskominfo	Tidak terakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2020
21.	Persandian	1. Presentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Diskominfo	Belum ada kegiatan pengamanan sinyal
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0%	Diskominfo	Belum ada system elektronik yang menerapkan prinsip system manajemen keamanan informasi/apli kasi persandian
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	Diskominfo	Belum pernah melakukan audit terhadap system elektronik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang telah ditetapkan	0%	Diskominfo	Belum ada kegiatan pengamanan terhadap titik-titik komunikasi pemerintahan
22.	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	108	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	44	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibangun (peningkatan	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		n	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan	0	Dinas Pariwisata dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemanfaatan koleksi museum		Kebudayaa n	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
23.	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk diwilayahnya (jiwa) 442,84 / 92.138 jiwa = 4,81%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk diwilayahnya X 100% 35.874 / 92.138 x 100% = 39%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	Ketersediaan tenaga perpustakaan	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan penduduk	diberbagai perpustakaan diwilayahnya Jumlah penduduk diwilayahnya 128 / 92.138 = 0,014%	an dan Kearsipan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya X 100% 116 / 92.138 x 100% = 0,13%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	67,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	44 Koleksi Budaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah seluruh arsip aktif X 100% 25.477 / 25.477 = 100%	Kearsipan	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip in-aktif X 100% 22.547 / 22.547 = 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah seluruh arsip statis X 100% 0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis X 100% 0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Penyelamatan arsip	0	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		Perpustakaan dan Kearsipan	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25.	Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan verifikasi usaha (RTP)	518 RTP	Dinas Perikanan	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah kabupaten	Dinas Perikanan	Lokasi pembuatan TPI belum memenuhi syarat dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			X 100% = 0%		perlu kajian
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, IUP menjadi kewenangan PTSP
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun yaitu 836	Dinas Perikanan	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	64.350 ekor benih	Dinas Perikanan	
26.	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	11 destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per	11 Rumah Makan dan 5 Usaha Perjalanan/	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sub jenis usaha di Kabupaten	Transportasi Wisata	dan Kebudayaan	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	256	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5 event	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Jumlah tenaga kerja pariwisata $\times 100\%$ $0 / 0 \times 100\% = 0\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan $\times 100\%$ $0 / 0 \times 100\% = 0\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
27.	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dukungan peralatan mesin Pertanian: 33 unit TR4, 10 Unit Cultivator, 50 Unit mesin pompa air, 21 Unit Combine Harvester Multifunction, 5 Unit Power Thresher/pemipil jagung.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	4 Unit Traktor, 1 Unit combain	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan Jumlah prasarana yang dibangun X 100% 4/4 x 100% = 100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah usulan usaha pertanian X 100% = 0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi Luas area terkena bencana X 100% = 0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
28.	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Belum ada		
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Belum ada		
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Belum ada		
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Belum ada		
29.	Energi dan sumber daya mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten	Tidak ada		
30.	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%	Dinas Koperasi, Perindag	
		2. Persentase penerbitan TDG	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Pindah ke perizinan
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Pindah ke perizinan
		4. Persentase penerbitan	0%	Dinas	Pindah ke

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		STPW yang tepat waktu untuk: a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		Koperasi, Perindag	perizinan
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Refocusing anggaran
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Refocusing anggaran
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Refocusing anggaran
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0%	Dinas Koperasi, Perindag	Refocusing anggaran
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	695,390/3.465,872x 100%= 20,06%	Dinas Koperasi, Perindag	
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera	Dinas Koperasi,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	ulang pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten $X 100\%$ $3 / 580 \times 100\% = 0,52\%$	Perindag	
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan $X 100\%$ $7 / 25 \times 100\% = 28\%$	Dinas Koperasi, Perindag	
31.	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk $X 100\%$	Dinas Koperasi, Perindag	
		2. lokasinya di daerah Kabupaten	0%		
		3. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0%	Dinas Koperasi, Perindag	
		4. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Dinas Koperasi, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diterbitkan	0/381X 100% = 0%		
		5. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 0/381X 100% = 0%	Dinas Koperasi, Perindag	
		6. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/kota 32/381X 100% = 8,4%	Dinas Koperasi, Perindag	
32.	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Belum ada	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 satuan pemukiman	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				dan PTSP	



1.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{2.618}{3.695} \times 100\%$	70,85%	Dinas PPO	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{8.795}{10.333} \times 100\%$	85,12%	Dinas PPO	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun ang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah Menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab. yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{3.907}{5.728} \times 100\%$	68,20%	Dinas PPO	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	$\frac{0}{22.845} \times 100\%$	0%	Dinas PPO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{pendidikan dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$				
2.	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{84}{92.138} \times 100\%$	0,91%	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah rumah sakit di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.103}{2.090} \times 100\%$	52,78%	Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang	1.257	60,14%	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin di Kabupaten $\times 100\%$	2.090 $\times 100\%$		Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten $\times 100\%$	1.224 1.281 $\times 100\%$	95,55%	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita di Kabupaten $\times 100\%$	6.196 7.369 $\times 100\%$	84,08%	Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten $\times 100\%$	11.820 16.061 $\times 100\%$	73,59%	Dinas Kesehatan	
		8. Persentase orang	Jumlah orang usia 15-59 tahun	45.196	77,09%	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	58.621		Kesehatan	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten}} \times 100\%$	6.568 8.416	78,04%	Dinas Kesehatan	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$	10.580 12.967	81,59%	Dinas Kesehatan	
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$	293 293	100%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar X 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	$\frac{151}{72} \times 100\%$	209,72%	Dinas Kesehatan	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar X 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten	$\frac{1.885}{1.852} \times 100\%$	101,78%	Dinas Kesehatan	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar X 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	$\frac{1.839}{1.821} \times 100\%$	100,99%	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	di WS kewenangan Kabupaten (ha) Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha) X 100%				
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) X 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan	$\frac{2.944}{4.427} \times 100\%$	66,50%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			pelihara (ha) Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten				
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten X 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh Kabupaten tersebut	11.832 21.221 x 100%	55,75%	Dinas PUPR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk+jumlah rumah tangga yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan	23.872 23.872 x 100%	100%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			air limbahnya diolah di IPALD X 100% Jumlah rumah di Kabupaten				
		6. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya X 100% Jumlah IMB yang berlaku	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		7. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap X 100% Jumlah Total Panjang jalan Kabupaten	$\frac{351,65 \text{ km}}{811,53 \text{ km}} \times 100\%$	43,33%	Dinas PUPR	
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatih operator dan teknisi/analisis X 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi X 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		konstruksi					
4.	Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang di tangani pada tahun 2024 Jumlah total rencana unit rumah korban bercana yang akan ditangani pada tahun 2024 $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang di tangani pada tahun 2024}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bercana yang akan ditangani pada tahun 2024}} \times 100\%$	0 0 $\times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan $\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	0 0 $\times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		3. Persentase kawasan	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 100 hektar yang	0 $\times 100\%$	0%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ kota yang ditangani	ditangani (ha) $\frac{\text{Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Hektar}}{\text{Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Hektar}} \times 100\%$	0			
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	0 0 x 100%	0%	Dinas PUPR	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	0 0 x 100%	0%	Dinas PUPR	
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	1 1 x 100%	100%	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/ Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	1 1 x 100%	100%	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana $\times 100\%$ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	250 250 $\times 100\%$	100%	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana $\times 100\%$ Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	260 0 $\times 100\%$	0%	BPBD	Belum ada dok. KRB dan PRB
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana $\times 100\%$ Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	27 27 $\times 100\%$	100%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Satuan Pol. PP dan Kebakaran	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	-	Tidak ada	BPBD	
6.	Sosial	1. Persentase	Jumlah Penyandang disabilitas	83	5,11%	Dinas Sosial,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Populasi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}}{\text{Populasi}} \times 100\%$	1.623 x 100%		PPPA	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten}} \times 100\%$	39 ————— x 100% 39	100%	Dinas Sosial, PPPA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
7.	Tenaga kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD $\times 100\%$ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	$\frac{2}{3} \times 100\%$	66,67%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\times 100\%$ Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{37}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) $\times 100\%$ Jumlah tenaga kerja	$\frac{839,52}{37} \times 100\%$	2.268%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang baik $\times 100\%$ Jumlah perusahaan	$\frac{9}{9} \times 100\%$	100%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang ditetapkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{12}{3.575} \times 100\%$	0,33%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP	
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Sosial, dan PPPA	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	$\frac{17}{17} \times 100\%$	100%	Dinas Sosial, dan PPPA	

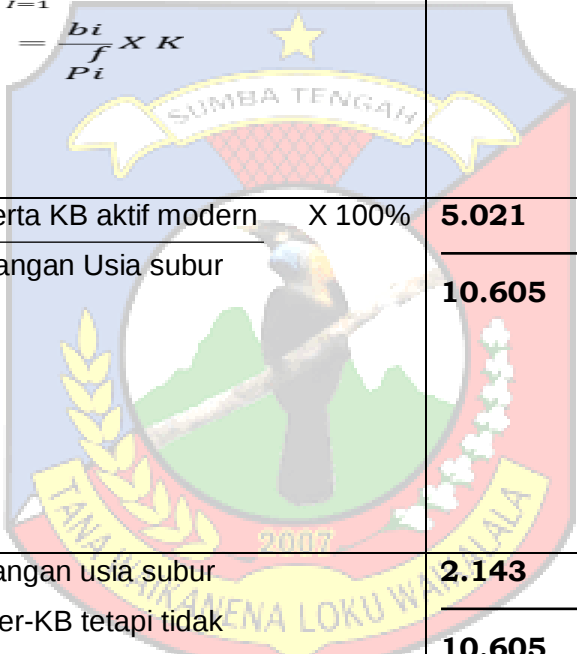
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)				
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	$\frac{10}{44.949} \times 100\%$	22,24%	Dinas Sosial, dan PPPA	
9.	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{0 \text{ ton}}{0 \text{ ton}} \times 100\%$	0%	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	
10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum}}{\text{Jumlah kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannay diatas ijin lokasi}}{\text{Luas ijin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari			Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan ijin membuka tanah}}{\text{Luas ijin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
11.	Lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	1) IKA (Indeks Kualitas Air) = 30% 2) IKD (Indeks Kualitas Udara) = 30% 3) ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 40%	$\text{IKA} = 30\% (56,57) + \text{IKU} = 30\% (91,86) + \text{IKL} = 40\% (52,1)$	69,88	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Terlaksananya Pengelolaan	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume sampah yang harus ditangani}} \times 100\%$	$\frac{3.458 \text{ ton}}{\text{Total volume sampah yang harus ditangani}} \times 100\%$	34,19%	Dinas Lingkungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Sampah di Wilayah Kabupaten	Total volume timbunan sampah Tahun berjalan	10.112,763 ton		Hidup	
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{0}{10} \times 100\%$	0%	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada jenis usaha atau kegiatan yang melanggar ijin lingkungan dan ijin PPLH
12.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 Tahun ke atas}} \times 100\%$	$\frac{56.527}{60.758} \times 100\%$	93,03%	Dinas Kependudukan dan Capil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{4.415}{29.146} \times 100\%$	15,14%	Dinas Kependudukan dan Capil	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta	$\frac{26.350}{\quad} \times 100\%$	60%	Dinas Kependudukan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			kelahiran X 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	43.898		n dan Capil	
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama X 100% Jumlah OPD	0 9 x 100%	0%	Dinas Kependudukan dan Capil	
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun X 100% Jumlah desa tertinggal per awal tahun 2024	10 33 x 100%	30,30%	Dinas PMD	
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun X 100% Jumlah desa berkembang per	2 30 x 100%	6,67%	Dinas PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			awal tahun 2024				
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Angka Kelahiran Total	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times K$ 	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tidak mempuny data angka kelahiran
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100\%$	$\frac{5.021}{10.605} \times 100\%$	47,35%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	$\frac{2.143}{10.605} \times 100\%$	20,21%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x	-	0	Dinas Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Kabupaten	bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)				
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	-	-	0	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{0}{32} \times 100\%$	0%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfo	
		3. Persentase Masyarakat Yang	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran</i>	$\frac{20.945}{\text{...}} \times 100\%$	34%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	<i>informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota</i> $\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	61.434			
17.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan hasil $\frac{\text{Jumlah seluruh koperasi}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{5}{47} \times 100\%$	10,63%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{7}{1.985} \times 100\%$	0,35%	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	
18.	Penanaman modal	1. Persentase peningkatan investasi di	(jumlah investasi tahun 2024– jumlah investasi tahun 2023) di Kabupaten $\frac{\text{Jumlah investasi tahun 2024} - \text{Jumlah investasi tahun 2023}}{\text{Jumlah investasi tahun 2023}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 377.491.784.000} - \text{Rp. 247.551.950.000}}{\text{Rp. 247.551.950.000}} \times 100\%$	52%	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Kabupaten	Jumlah investasi tahun 2023 di Kabupaten	Rp. 247.551.950.000		PM dan PTSP	
19.	Kepemudaan dan olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{951}{2.705} \times 100\%$	35,16%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{855}{2.705} \times 100\%$	31,61%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	-	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	$\frac{30}{32} \times 100\%$	93,75%	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		(OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	daerah X 100% Jumlah OPD				
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah X 100% Jumlah OPD	30 32 x 100%	93,75%	Diskominfo	
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi X 100% Jumlah area penilaian	0 0 x 100%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22.	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan X 100% Jumlah cagar budaya yang	108 44 x 100%	245%	Dinas Pariwisata dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			terdata			Kebudayaan	
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	72,09	72,09	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	67,59	67,59	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59	-	-	Tidak ada	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	-	Tidak ada	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	
25.	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$	$\frac{12.214,22}{14.229,03} \times 100\%$	85,84%	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		KKP)					
26.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun 2024} - \text{jumlah wisatawan tahun 2023}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2023}} \times 100\%$	$\frac{2.128 - 1.348}{1.348} \times 100\%$	58%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun 2024} - \text{jumlah wisatawan tahun 2023}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2023}} \times 100\%$	$\frac{3.580 - 8.515}{8.515} \times 100\%$	-58%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah Kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$	$\frac{41}{78} \times 100\%$	52,56%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total nilai kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlak}}$	$\frac{1,56 \text{ M}}{1.527,18 \text{ M}} \times 100\%$	0,10%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$	$\frac{1.170.308.816}{24.223.155.251} \times 100\%$	4,83%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
27.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{3,35 \text{ ton}}{17.194 \text{ ha}} \times 100\%$	0,02%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{3.529-931}{931} \times 100\%$	279%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
28.	Energi dan sumber daya mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang	-	-	Tidak ada		Menjadi Kewenangan Provinsi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		memiliki ijin di Kabupaten					
29.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan $\times 100\%$ Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	373 1985 $\times 100\%$	18,79%	Dinas Koperasi, Perindag	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK $\times 100\%$	695,390 3.465,872 $\times 100\%$	20,06%	Dinas Koperasi, Perindag	
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan $\times 100\%$ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	3 580 $\times 100\%$	0,52%	Dinas Koperasi, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
30.	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun 2023} - \text{Jumlah IKM tahun 2022}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{381-273}{273} \times 100\%$	39,56%	Dinas Koperasi, Perindag	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			0%	Dinas Koperasi, Perindag	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Koperasi, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ = 0%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Koperasi, Perindag	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Koperasi, Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Kabupaten					
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	22 Industri Kecil Menengah	Indeks 100%	Dinas Koperasi, Perindag	



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Isian Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Perencanaan keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{80.969.283.492}{663.337.773.448} \times 100\%$	12,20%	Badan keuangan daerah	
		2. Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	$\frac{23.771935.572}{658.586.168.778} \times 100\%$	3,60%	Badan keuangan daerah	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak dilakukan penilaian (N/A)	N/A	Inspektorat Daerah	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Tingkat Kualitas APIP (level 2)	Level 2	Inspektorat Daerah	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{404.383.284.771-138.548.807.735}{663.337.773.448} \times 100\%$	40,07%	Badan Keuangan Daerah	

		transfer expenditures)					
		6. Opini Laporan Keuangan	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	-	WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP Unaudit	Badan Keuangan Daerah	
2.	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja _____ X 100% Total belanja APBD	663.337.773.448 _____ -1 x 100% 674.249.816.622	1,61%	Badan Keuangan Daerah	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi _____ X 100% Total PAD dalam APBD	23.771.935.572 _____ -1 x 100% 28.864.670.055	17,64%	Badan Keuangan Daerah	
		3. Assets	1) Apakah ada daftar asset tetap? 2) Apakah ada manual untuk menyusun		1) Ya	Badan	

		Management	daftar asset tetap? 3) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?		2) Ya 3) Ya 4) Ya	Keuangan Daerah	
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{37.163.651.467}{633.215.520.883} \times 100\%$	5,87%	Badan Keuangan Daerah	
3.	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	$\frac{796}{922} \times 100\%$	86,33%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{224}{922} \times 100\%$	24,30%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	
		3. Rasio Jabatan	Jumlah pegawai fungsional yang	17	7,59%	Badan	

		Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	memiliki sertifikat kompetensi X 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	224 x 100%		Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	
4.	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 X 100% Jumlah kontrak keseluruhan pada tahun 2024	0 x 100% 385	0%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	110 x 100% 385	28,57%	Bagian Administrasi Pembangunan	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan X 100% Total belanja langsung	145.808.135.185 x 100% 559.751.087.213	26,05%	Bagian Administrasi Pembangunan	

		4. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2024 – jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2023 Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2023 X 100%	$\frac{145.718.745.793 - 194.494.937.291}{194.494.937.291} \times 100\%$	-25,08%	Bagian Administrasi Pembangunan	
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda X 100%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Diskominfo	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah Dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total Jumlah Dokumen yang telah dirinci X 100%	$\frac{9}{9} \times 100\%$	100%	Diskominfo	

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024. Pada Bab III ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja indicator tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian Tahun lalu, serta capaian Kinerja Pemda dan Pemerintah Pusat. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per tujuan dan sasaran, realisasi anggaran per tujuan dan sasaran, factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta perolehan prestasi yang terkait dengan indicator kinerja tujuan dan sasaran.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024. Kinerja tahun 2024 ini merupakan tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Secara rata – rata capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 89,86 yang dihitung dari rata – rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 ada sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJ A
Tujuan I : Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi						
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas sector produktif	Kontribusi PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	%	42,08	42,29	100,49
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,0	0,70	70
2	Meningkatnya peran dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	50	50	100
Tujuan II : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memastikan meningkatnya kesempatan kerja , meningkatkan pendapatan masyarakat meningkatnya ketahanan pangan dan berkurangnya kemiskinan						
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	Rp	10,136	15,262	151
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah	5,75	1,89	32,86
5.	Berkurangnya	Angka	%	30,51	30,84	98,92

	kemiskinan	Kemiskinan				
6.	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75	73	97,33
Tujuan III : Mewujudkan SDM Sumba Tengah yang unggul, terampil dan berdaya saing serta berkesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan						
7	Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	13,04*	98,19
8.	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,11	69,46	100,50
9.	Meningkatnya Kesempatan bagi Perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,74	54,16*	87,72
Tujuan IV : Mewujudkan Ketersediaan dan Keterjangkauan infrastruktur Pelayanan Dasar dan pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan						
10	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75	48	63,35
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	65	69,92	107,56
Tujuan V : Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan professional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan public						
12	Mewujudkan birokrasi yang professional untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60	43,43*	72,38
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100
13	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
14	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi	Skor Survey Penilaian Integritas	Skor	80	73,84	92,3
15	Terwujudnya transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,50	2,19	87,6
16	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,0	1,72	57,33

Ket : * : data yang digunakan merupakan data sementara

B. Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 terhadap masing – masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya produksi dan produktivitas sector produktif					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Kontribusi PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	%	42,08	42,29	100,49
2.	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,0	0,70	70

• **Kontribusi PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

PDRB pada Tingkat Regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output pada suatu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Indikator ini merupakan indikator yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026. Sebagaimana pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan selisih 0,53 dari target yang ditetapkan.

Perbandingan indikator ini dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024 (Tahun I RPD)			Tahun 2025 (Tahun Ke II RPD)
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kontribusi PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	%	42,08	42,29	100,49	42,18
2.	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,0	0,70	70	1,50

Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan langkah sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan produktifitas pertanian
 - Modernisasi pertanian
 - Diversifikasi tanaman
 - Pengolahan lahan berkelanjutan
 - Penyuluhan dan pelatihan
- ✓ Pengembangan sektor perikanan
 - Budidaya perikanan
 - Peningkatan teknologi tangkap
 - Pengolahan hasil perikanan
 - Penguatan akses pasar

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Pencapaian indikator kinerja Kontribusi PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tahun 2024 secara keseluruhan pembangunan bidang pertanian adalah dukungan

kebijakan, anggaran, kelembagaan dan pendampingan teknologi budidaya mendapatkan prioritas dalam perumusan program strategis desa mandiri benih, desa mandiri perkebunan dan kawasan/desa mandiri pangan. Keberhasilan program prioritas daerah dimaksud dapat dilihat pada tingkat produksi benih bersertifikasi yang tersedia untuk kecukupan benih bagi petani di Kabupaten Sumba Tengah dan penangkar benih yang diintervensi sudah menjadi penyedia benih untuk Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya berdasarkan data benih yang tersalur. Demikian halnya dalam pengembangan komoditi perkebunan, hortikultura secara bertahap mengalami budidaya yang intensif dalam skala kecil dan menengah berorientasi pasar. Pencapaian ini didukung dengan adanya upaya yang telah dilakukan secara teknis sebagai berikut :

- ✓ Adanya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
- ✓ Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan pra sarana penyuluhan pertanian yang terdiri dari 36 Unit TR4 Traktor, 21 unit combain
- ✓ Adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan pelaku distribusi pangan yang ada di daerah
- ✓ Tersedianya dokumen analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan
- ✓ Perkembangan Perkebunan : kegiatan rutin yaitu pemantauan perkembangan komoditi kopi, kakau, pinang , kemiri, kelapa dan pengadaan alat kupas/ pemipil biji kemiri sebanyak 5 unit , 5 kelompok tani/gapoktan di 5 desa yang berbeda karena didapatkan luas tegakan tanaman kemiri yang cukup dan sudah berproduksi dan sudah membantu memperbaiki ekonomi rumah tangga.
- ✓ Pemberian bantuan benih padi label biru kepada kelompok tani sebanyak 6.750 Kg kepada 17 kelompok tani. Pupuk NPK Non Subsidi 7000 kg untuk tanaman padi seluas 70 ha Kegiatan Optimalisasi Daerah bantaran Sungai, 800 kg pupuk NPK Non Subsidi untuk Jagung Batuan pupuk NPK Sumber dana APBD sebanyak 550 kg pada kec.Umbu R.Barat 200 kg dan Kec. Umbu R.Tengah sebanyak 350 kg, Biofortifikasi seluas 500 ha. Saprodi yg diterima berupa Pupuk NPK Non subsidi sebanyak 50 ton dan obat 500 liter (Pestisida 500 Liter dan Fungsida sebanyak 500Kg. Prasarana budidaya ikan air tawar sangat memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemijahan ikan berlangsung dengan baik serta adanya pendampingan secara berkesinambungan dari penyuluh perikanan dan tenaga teknis lapangan dalam konsep CBIB (Cara Budidaya Ikan yang baik dan benar)
- ✓ Adanya pemberdayaan bina kelompok nelayan yang secara intens di bina dan ditingkatkan pemahamannya dalam bidang perikanan.

• **Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan**

Industri Pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian. Seperti memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi

Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sumba Tengah memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB, pada tahun 2023 sektor industri pengolahan menyumbang Rp 8.730 juta terhadap PDRB Kabupaten Sumba Tengah, meskipun kontribusinya masih terbatas, sektor industri pengolahan menunjukkan potensi untuk berkembang. Pengembangan sektor ini dapat berfokus pada peningkatan industri kecil dan rumah tangga khususnya dalam pengolahan hasil pertanian dan peternakan lokal guna meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Langkah kedepan yang dilakukan agar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat :

- ✓ Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, peternakan dan perikanan untuk memastikan ketersediaan bahan baku
- ✓ Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam pengolahan produk berbasis teknologi modern

- ✓ Meningkatkan literasi digital dan kemampuan pemasaran online bagi pengusaha lokal
- ✓ Mendorong kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha industri pengolahan melalui KUR atau dana hibah pemerintah
- ✓ Mendorong kolaborasi antara UMKM Lokal dengan perusahaan besar untuk meningkatkan skala produksi dan daya saing

SASARAN 2 : Meningkatnya peran dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	50	50	100

Kabupaten Sumba Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pariwisata di Sumba Tengah terdiri dari Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Pantai. Dengan kekuatan keindahan alam dan budayanya yang unik, adanya potensi pengembangan ekowisata, Sumba Tengah dapat menjadi salah satu destinasi unggulan di NTT. berikut beberapa informasi terkait perkembangan kedua sektor tersebut :

Pengembangan sektor pariwisata

- Rencana induk kepariwisataan ;Pada tahun 2023 adanya penetapan Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata untuk periode 2022 – 2040 yang bertujuan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan yang kreatif guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih cepat.
- Adanya pembuatan masterplan pariwisata wilayah kawasan Pantai Selatan dan Utara
- Adanya pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah
- Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sejumlah 9.863.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif

Sub Sektor Ekonomi kreatif yang dikembangkan dan di bina adalah sebagai berikut :

- Sub sektor Arsitektur ; bentuk intervensi untuk mengembangkan sub sektor ini adalah dengan memberikan dana hibah kepada masyarakat pada Kampung Situs/ Adat untuk pembangunan Rumah Adat sebagai salah satu objek wisata budaya
- Sub sektor music : dengan mengembangkan dan mewadahi adanya pagelaran music etnik Sumba
- Sub sektor seni rupa ; bentuk kegiatan ini adalah adanya pelatihan kesenian tradisional yang diikuti dari masyarakat desa wisata berjumlah 100 orang yang dibagi dalam 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan pahat, pembuatan rowa,pembuatan katippa dan music tradisonal juga
- Sub sektor desain produk; adanya pelatihan pangan lokal yang diikuti oleh 30 orang peserta dari empat kecamatan dan diberi pelatihan berupa pengolahan bahan pangan lokal dan desain produk pangan lokal yang telah diolah dan dipasarkan. Pelatihan ini didampingi oleh dua narasumber yang bergerak di bidang kuliner. Setelah diberikan pelatihan peserta diberikan alat alat pengolahan pangan lokal untuk dipergunakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki
- Sub sektor fashion; adanya kegiatan fashion dalam nuansa music etnik sumba yang dilakukan di Cekdam Lokuujung. Kegiatan ini melibatkan fashion show sanggar OSA yang menampilkan tenunan bermotif Sumba

- Sub sektor seni pertunjukan ; adanya event budaya Purung Ta Liangu Marapu, Ritual Tauni Tamma, adanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional, Monitoring Sanggar Kesenian Sekolah dan Masyarakat dan melakukan pendataan objek Pemajuan Kebudayaan, Musik Etnik Sumba, Festival layang – Layang, Festival Tunas Bahasa Ibu.
- Sub sektor aplikasi; adanya pembuatan website pariwisata sebagai media promosi berbasis teknologi.
- Sub sektor Kuliner; adanya pelatihan pangan lokal dari UMKMyang berada di Sumba Tengah
- Sub sektor Film, Animasi dan Video; adanya peliputan media tempo ‘ jelajah negeri’ yang dilakukan di beberapa titik destinasi pariwisata di Sumba Tengah diantaranya di kampung Adat, padang savannah dan air terjun Matayangu, Cekdam Lokuujung dan di Pantai Maloba.
- Kerajinan tenun dan anyaman :
Masyarakat di beberapa desa memiliki keahlian dalam membuat tenun dan produk anyaman dari bahan lokal, potensi ekonomi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumba Tengah menghadapi beberap tantangan antara lain : keterbatas SDM dan Infrastruktur pendukung, oleh karena itu diperlukan upaya kolaboratif antara pmda, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendapatan perkapita	Rp	10,136	15,262	151

Pendapatan Perkapita = PDRB : JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan data terbaru tahun 2023, PDRB Kabupaten Sumba Tengah mencapai 1.527,92 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta, Sembilan puluh dua rupiah) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah 91.531 (Sembilan satu ribu lima ratus tiga puluh satu) Jiwa, sehingga pendapatan perkapita sebesar 15,262 (Lima juta dua ratus enam puluh dua ribu) per tahun

- Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata – rata per penduduk di suatu Negara. Pendapatan Perkapita ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
- Untuk meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Sumba Tengah diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai berikut :
 - Mendorong diversifikasi tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura dan peternakan sapi
 - Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan produksi hasil laut perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan produksi hasil laut dan perairan darat
 - Membantu akses permodalan bagi pengusaha kecil agar bisa mengembangkan usaha industri pengolahan
 - Meningkatkan kualitas layanan wisata termasuk akomodasi,transportasi dan pemandu wisata
 - Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan alam yang ada di Sumba Tengah
 - Mendorong ekonomi kreatif seperti kerajinan tenun, anyaman dan produk kas lokal yang bisa dipasarkan lebih luas

- Memberikan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat, khususnya bagi angkatan kerja muda
- Menyediakan program pelatihan digital dan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
- Memperbaiki jalan, jembatan dan transportasi untuk memudahkan distribusi barang dan jasa
- Meningkatkan akses listrik dan internet untuk mendukung industri, UMKM dan sektor jasa.
- Mempermudah regulasi dan perizinan bagi pelaku usaha agar sektor ekonomi berkembang lebih cepat.

Sasaran 4 : Meningkatnya kesempatan kerja					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah	5,75	1,89	32,86

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan trend yan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, berikut data TPP Kabupaten Sumba Tengah:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah	1,21	1,89	1,89

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dari total angkatan kerja di Kabupaten Sumba Tengah sekitar 1,89% diantaranya tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, meskipun terjadi peningkatan TPP dari 1,21% pada tahun 2021 menjadi 1,89% pada tahun 2022 dan 2023, angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata – rata nasional

- Perbandingan TPT antar Kabupaten sebagai berikut (Tahun 2024) :
 - ✓ Kabupaten Sumba Barat : 3,52%
 - ✓ Kabupaten Sumba Barat Daya : 2,64%
 - ✓ Kabupaten Sumba Timur : 2,21%
 - ✓ Kabupaten Sumba Tengah : 1,89%

Sasaran 5 : Berkurangnya kemiskinan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	%	30,51	30,84	98,92

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini mencapai **98,92 %** atau dapat dikategorikan **berhasil**. Pengukuran keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 dan tertuang dalam arah dan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah diwujudkan dalam bentuk:
 - ✓ Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

- ✓ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin
- ✓ Meminimalkan Wilayah kantong kemiskinan

Dari berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengintervensi kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 31,78% pada tahun 2023 menjadi 30,84% atau sebesar 0,94%. Penurunan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama Tiga Tahun terakhir Jumlah Penduduk Miskin di Sumba Tengah terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2021, jumlah Penduduk Miskin masih berada pada angka 25,48ribu menjadi 24,49ribu di Tahun 2022, dan mengalami penurunan lagi di tahun 2023 menjadi 24,24 ribu penduduk miskin. Penurunan ini selaras dengan nilai presentase penduduk miskin yang juga menunjukkan tren menurun dari 34,27% di tahun 2021 hingga 31,78% di tahun 2023.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk dapat mengintervensi kemiskinan adalah:

- Tindak lanjut dalam monitoring berupa langkah korektif terhadap kinerja (Performance), keluaran(output), dan hasil/manfaat (Outcome), serta dampak (impact) dari pelaksanaan program/ kegiatan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip good governance, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja. Kegiatan monitoring dilakukan dengan focus dengan memperhatikan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin harus dilaksanakan secara berkala agar data yang dihasilkan menjadi tepat sasaran
- Untuk penyeragaman data kemiskinan yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada data yang dikeluarkan SATU DATA INDONESIA, sehingga dalam merencanakan masalah penanggulangan kemiskinan seluruh PD mengacu pada data yang sama
- Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan penataan kelembagaan yang mengutamakan hak – hak dasar masyarakat.

Hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah sebagai berikut :

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, berikut langkah yang dapat diambil :

Penguatan sektor pertanian dan peternakan

- Pemberian bantuan sarana produksi : penyediaan bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian moderen kepada petani
- Pelatihan dan pendampingan : peningkatan ketrampilan petani dan peternak dalam teknik bertani dan beternak yang lebih produktif
- Pembangunan irigasi
- Penguatan pasar

Pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan

- Beasiswa dan bantuan pendidikan
- Pendidikan dan pelatihan fokalional (kerajinan, jasa atau teknologi)
- Peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah
- Peningkatan akses kesehatan dan gizi
- Pelayanan kesehatan gratis dan bersubsidi
- Program gizi dan pencegahan stunting
- Pembangunan infrastruktur kesehatan (jumlah puskesmas dan tenaga medis)
- Pengembangan infrastruktur dan konektivitas :
- Perbaikan jalan dan transportasi
- Penyediaan air bersih dan sanitasi
- Akses listrik dan internet
- Pemberdayaan ekonomi dan UMKM

- Pelatihan kewirausahaan
- Akses permodalan
- Penguatan produk lokal (kerajinan tangan produk daerah dan hasil pertanian)
- Optimalisasi Program Perlindungan Sosial
- Bantuan sosial tepat sasaran (PKH dengan BPMT)
- Program Padat Karya
- Pemberdayaan Perempuan

Sasaran 6 : Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75	73	97,33

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini mencapai 97,33 % atau dapat dikategorikan Berhasil. Pengukuran keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan Skor PPH di Kabupaten Sumba Tengah, beberapa langka yang dapat diambil antara lain :
- Difersivikasi Pangan Lokal : mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai jenis pangan lokal yang kaya nutrisi seperti umbi – umbian, kacang – kacangan, sayuran dan buah - buahan
- Edukasi Gizi : melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya pola makan seimbang dan beragam kepada masyarakat termasuk cara mengolah pangan lokal menjadi makanan yang menarik dan bergizi
- Pengembangan pertanian lokal : mendukung petani lokal dalam memproduksi berbagai jenis komoditas pangan, melalui pelatihan, penyediaan bibit unggul dan akses terhadap teknologi pertanian
- Peningkatan akses pangan : memperbaiki infrastruktur dan jaringan distribusi pangan agar masyarakat terutama di daerah terpencil dapat lebih mudah mendapatkan berbagai jenis pangan.
- **Skor Pola Pangan Harapan**, adalah indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat beragam dan seimbang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan yang ditargetkan 75 dapat mencapai skor realisasi 73 sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,33%.

Jika factor ketersediaan yang menjadi masalah/dialami dalam rumah tangga, maka menjadi tolok ukur bagi peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memastikan ketersediaan pangan aman untuk kebutuhan konsumsi tiap hari. Minimal berdasarkan standar pemerintah untuk mencapai angka kecukupan gizi (AKG) 9 kelompok pangan diupayakan tersedia cukup ditingkat masyarakat. Sedangkan apabila factor pola konsumsi yang terjadi (ketersediaan pangan cukup), maka menjadi tugas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha guna mengingatkan, mendampingi dan mengedukasi masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat serta makan B2SA paling tidak untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil survei bahwa total energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2024 adalah 2664 Kkal/kap/hari (100 %). Angka ini sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi standar nasional yakni 2100 Kkal/kap/hari. Jika dilihat dari keragaman persentasi kontribusi energi masing-masing kelompok pangan hanya kelompok padi-padian yang mencapai bahkan melebihi AKG yakni sebesar 2174,5 Kkal dari standar nasional (lihat tabel pembanding), sedangkan kelompok pangan selain padi-padian perlu ditingkatkan untuk mencapai standar AKG tingkat konsumsi.

Keragaman kontribusi energi tiap kelompok pangan berdasarkan data survei untuk konsumsi penduduk Sumba Tengah Tahun 2024 dengan standar AKG dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel perbandingan :

Kelompok pangan	AKG Nasional 2100 Kkal	AKG Sumba Tengah 2664 Kkal	Persentase Perbandingan			
			Scor AKE	Scor Maks	Scor PPH	+/-
Padi-padian	1050	2174,5	51,8	25,0	25,0	26,8
Umbi-umbian	126	12,0	0,3	2,5	0,3	-2,2
Pangan Hewani	252	169,7	16,2	24,0	16,2	-7,8
Minyak & Lemak	210	103,5	2,5	5,0	2,5	-2,5
Buah/biji berminyak	63	34,3	0,8	1,0	0,8	-0,2
Kacang-kacangan	105	15,2	1,4	10,0	1,4	-8,6
Gula	105	31,2	0,7	2,5	0,7	-1,8
Sayur dan buah	126	109,4	26,1	30,0	26,1	-3,9
Lain-lain	63	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2100	2664	99,7	100	73	

Memperhatikan data pada tabel perbandingan diatas, sampai dengan Tahun 2024 konsumsi pangan penduduk Sumba Tengah khusus sumber karbohidrat (kelompok padi-padian) mendominasi bahkan dikategorikan melebihi standar AKG, oleh karna itu perlu ada upaya untuk pengurangan secara bertahap, disamping mengupayakan peningkatan konsumsi kelompok pangan umbi-umbian yang juga merupakan sumber karbohidrat yang berbeda cukup besar dari standar AKG. Sedangkan kelompok pangan yang perlu ditingkatkan konsumsi pada tingkat rumah tangga adalah kelompok pangan hewni, minyak/lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah. Sejak tahun 1995 Departemen Kesehatan RI telah menetapkan klasifikasi tingkat konsumsi pangan/tingkat konsumsi energi (AKE) dalam 5 kategori antara lain :

- Kasifikasi deficit berat (tingkat konsumsi energi < 70%)
- Kasifikasi deficit sedang (tingkat konsumsi energi 70 – 79 %)
- Kasifikasi deficit ringan (tingkat konsumsi energi 80 – 89 %)
- Kasifikasi deficit normal (tingkat konsumsi energi 90 – 119 %)
- Kasifikasi deficit kelebihan konsumsi (tingkat konsumsi energi > 120 %)

Berdasarkan klasifikasi diatas, jika dibandingkan total energi yang dikonsumsi penduduk Sumba Tengah berdasarkan hasil Analisa data survei Tahun 2024 yakni sebesar 2664 Kkal/kap/hari, AKE penduduk Sumba tengah termasuk dalam klasifikasi deficit tingkat sedang karena nilai skor PPH konsumsi baru mencapai 73 %. Kondisi ini memberi nilai/makna bahwa pemerintah punya peran yang sangat penting untuk mewujudkan keragaman konsumsi energi AKE pada tingkat masyarakat, untuk mencapai satan nasional atau paling tidak mencapai target yang ditetapkan pada indicator kinerja Rencana Strategis OPD baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek perencanaan. Hal ini membutuhkan keberpihakan saat pengambilan kebijakan Pemerintah dalam bentuk intervensi alokasi anggaran. Hambatan/Kendala yang terjadi serta upaya antisipasi.

Beberapa kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan survei pola pangan harapan (PPH Konsumsi) rumah tangga antara lain :

- Terbatas anggaran yang teralokasi, yang berakibat pada pelaksanaan survei yang mestinya dilakukan 3 hari per desa untuk mendapatkan data konsumsi pada 15 rumah tangga selama 3 hari, tetapi yang terjadi survei hanya dilakukan 2 hari untuk satu desa, disini lain juga ada rumah tangga yang ditetapkan menjadi sampel saat didatangi bersamaan dengan acara keluarga atau kegiatan sosial budaya.

- Terbatas sarana peralatan kerja antara lain perangkat komputer/laptop yang berakibat pada keterlambatan perekapan dan analisa data.
- Terbatas tenaga ahli yang punya kapasitas spesifik.

Beberapa langkah antisipasi terhadap hambatan dan kendala yang terjadi, yaitu :

- Pelaksanaan survei rumah tangga dilaksanakan secara tim dari dinas untuk membantu percepatan pada semua sasaran survei.
- Pelaksanaan perekapan data hasil survei juga dilakukan oleh masing-masing tim sesuai lokasi survei
- Diharapkan adanya pelatihan peningkatan kapsitas bagi tenaga analis.
- Diharapkan adanya alokasi sarana kerja seperti perangkat komputer yang memadai untuk mendukung percepatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan bidang.

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	13,04*	98,19

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini sebesar **98,19%** atau dapat dikategorikan **Berhasil**. Pengukuran keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- HLS adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak – anak dalam pendidikan formal selama hidupnya. HLS mencerminkan ekspetasi terhadap sistem pendidikan di suatu wilayah dan menjadi salah satu komponen dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia
- Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumba Tengah HLS diwilayah ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun :
 - ✓ Tahun 2019 : 12,66 tahun
 - ✓ Tahun 2020 : 12,96 tahun
 - ✓ Tahun 2022 : 13,12 tahun
 - ✓ Tahun 2023 : 13,13 tahun
 - ✓ Tahun 2024 : 13, 14 tahun

Peningkatan HLS ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah, namun untuk mencapai target nasional dan meningkatkan kualitas SDM, upaya lebih lanjut masih diperlukan. Beberapa langka yang diambil untuk meningkatkan HLS :

- Peningkatan akses pendidikan
 - ✓ Membangun dan memperbaiki infrastrukur sekolah terutama di daerah terpencil
 - ✓ Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Pelatihan dan pengembangan professional bagi guru
 - ✓ Penyediaan fasilitas belajar yang memadai seperti perpustakaan dan laboratorium
- Program Pendidikan NON FORMAL
 - ✓ Menyelenggarakan kursus dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal

Dengan implementasi strategi – strategi tersebut diharapkan HLS di Kabupaten Sumba Tengah dapat terus meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

- Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) empat Kabupaten (tahun 2024):
 - ✓ Kabupaten Sumba Barat : 12,62 tahun
 - ✓ Kabupaten Sumba Timur : 13,36 tahun

- ✓ Kabupaten Sumba Barat Daya : 12,63 tahun
- ✓ Kabupaten Sumba Tengah : 12,62 tahun
- Perbandingan HLS di Kabupaten Sumba Tengah
 - ✓ Tahun 2022 : 12,60 tahun
 - ✓ Tahun 2023 : 12,61 tahun
 - ✓ Tahun 2024 : 12,62 tahun

Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,11	68,46	100,50

- Usia harapan hidup adalah rata – rata jumlah tahun yang diperkirakan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan pola kematian yang ada disuatu wilayah pada waktu tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup suatu populasi
- Faktor yang mempengaruhi UHH :
 - ✓ Kesehatan dan gizi : akses kesehatan, imunisasi dan gizi yang cukup
 - ✓ Lingkungan Hidup : polusi udara, sanitasi dan akses air bersih
 - ✓ Ekonomi dan Pendidikan : tingkat kemiskinan, akses pendidikan dan pekerjaan
 - ✓ Gaya Hidup : pola makan, kebiasaan olahraga dan konsumsi rokok atau alkohol
- Strategi meningkatkan UHH :
 - ✓ Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
 - Memperluas cakupan BPJS kesehatan dan layanan kesehatan Primer
 - Meningkatkan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis di daerah terpencil
 - ✓ Perbaikan gizi dan pola sehat
 - Kampanye makan sehat dan pencegahan stunting
 - Meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan pola hidup sehat
 - ✓ Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
 - Meningkatkan program imunisasi dan pencegahan penyakit seperti TBC dan Malaria
 - Mengurangi konsumsi rokok dan alkohol untuk mencegah penyakit jantung dan kanker
 - ✓ Perbaikan Lingkungan dan Sanitasi
 - Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di daerah terpencil
 - Mengurangi polusi udara dan pencemaran lingkungan
- UHH : tahun 2020 : 68,65%, tahun 2021 : 68,87%
- Perbandingan dengan Kabupaten lain di Provinsi NTT
 - ✓ Kabupaten Sumba Barat Daya : 68,99 tahun
 - ✓ Kabupaten Nagekeo : 67,91 Tahun
 - ✓ Kabupaten Manggarai Timur : 68,77 Tahun

Penjelasan dari data tersebut UHH Kabupaten Sumba Tengah berada pada kisaran yang relatif sama dengan beberapa Kabupaten lain di Provinsi NTT

Sasaran 9 : Meningkatnya Kesempatan bagi Perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,74	54,16*	87,72

Pencapaian kinerja pada sasaran ini sebesar **87,72%** atau dapat dikategorikan **Berhasil**. Pengukuran keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Indeks Pemberdayaan Gender adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keterlibatan dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan termasuk politik, ekonomi dan pengambilan keputusan
- Indeks Pemberdayaan Gender ini dihitung berdasarkan tiga aspek utama yaitu : partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan tenaga kerja, kontrol atau sumber daya ekonomi
- Presentase partisipasi perempuan di DPRD tahun 2023 adalah
- Tantangan IPG : rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, kesenjangan upah antara laki – laki dan perempuan, masih terbatasnya akses perempuan ke posisi managerial dan kepemimpinan
- Strategi Peningkatan Pemberdayaan Gender sebagai berikut :
 - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan di politik,
 - meningkatkan kuota perempuan dalam pemilu dan jabatan public
 - mendorong kaderisasi perempuan dalam partai politik
 - ✓ Penguatan Peran Perempuan di ekonomi
 - Pemberdayaan UKM perempuan melalui akses modal dan pelatihan
 - ✓ Akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan
 - Meningkatkan akses perempuan ke pendidikan tinggi
 - Memastikan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik
 - Indeks pemberdayaan gender kabupaten sumba tengah tahun 2022 : 53,76%, tahun 2023 : 54,16%

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas infrastruktur					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75	48	63,35

Pencapaian kinerja pada sasaran ini sebesar **63,35 %** atau dapat dikategorikan **Berhasil**. Indikator ini merupakan indikator baru yang rekomendasikan dalam desk perbaikan indikator pada dokumen perencanaan strategis (RPD 2024-2026). Perhitungan indikator ini merupakan gabungan dari beberapa indikator yaitu: indikator Panjang Jalan, jembatan, perumahan, irigasi dan perhubungan.

- Indikator Panjang jalan Kabupaten Sumba Tengah, dalam kondisi baik sampai dengan Tahun 2023 sepanjang 354,0km, kondisi sedang 173,7km, kondisi rusak 129,9km,dan kondisi rusak berat sepanjang 189,3km,dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Sumba Tengah 846,9km
- Panjang jaringan irigasi 74. 971m Panjang jaringan irigasi 74. 971m untuk mengairi 36 Daerah Irigasi dengan luas lahan daerah layanan irigasi 4,427 ha. Dari total ini, areal yang terdampak jaringan irigasi 2,994ha. Pada tahun 2024, panjang jaringan irigasi yang dikerjakan adalah 4,258,2 m sehingga total panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 adalah 56,04m.

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	65	69,92	107,56

Pencapaian kinerja pada sasaran ini sebesar **107,56 %** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pengukuran keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara(IKU),dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di targetkan 65 dapat direalisasikan menjadi 69,92 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 107, 56%.

Berikut merupakan nilai target IKA, IKU, IKLH Kabupaten Sumba Tengah :

No	Tahun	IKA		IKU		IKL		IKLH	
		Capaian	Rating	Capaian	Rating	Capaian	Rating	Capaian	Rating
1.	2022	50	Sedang	92,86	Sangat baik	52,38	Sedang	67,88	Sedang
2.	2023	50	Sedang	93,62	Sangat Baik	52,39	Sedang	68,19	Sedang
3.	2024	56,57	Sedang	91,86	Sangat Baik	52,1	Sedang	69,92	Sedang

Sasaran 12 : Mewujudkan birokrasi yang professional untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan partisipatif					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60	43,43**	72,38
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100

Indeks Reformasi Birokrasi, menggambarkan sejauh mana kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang professional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah secara bertahap diupayakan dengan melakukan Penyusunan Penyesuaian Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang menekankan pada Reformasi Birokrasi yang lebih berdampak dan kolaboratif Sebagaimana mengacu pada PermenpanRB No 3 tahun 2023. Kegiatan Utama yang telah ditetapkan pada Reformasi Birokrasi General dan Tematik telah disusun rencana aksi pelaksanaannya dan disampaikan pada Portal Refromasi Birokrasi Nasional. Sampai dengan kondisi terakhir penyusunan laporan ini, indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tersebut belum dirilis sehingga data yang dipakai adalah Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Sumba terus dilakukan dan diupayakan yaitu dengan secara intens melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperbaiki kualitas dokumen sakip yang ada. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu Kabupaten yang secara intens didampingi oleh Kementerian PANRB sebagai Evaluator Nasional untuk secara langsung memperbaiki dan dokumen sakip lingkup Pemerintah Daerah dan sebahagian Perangkat Daerah menjadi dokumen sakip yang lebih baik dan sesuai dengan pedoman. Atas upaya dimaksud maka pada Tahun 2024 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Sumba Tengah menjadi 60,15 dengan Predikat B sebagaimana yang termuat dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/361/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi Sakip Sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	18,36	20,03
Pengukuran Kinerja	30	15,90	17,24
Pelaporan Kinerja	15	9,03	9,41
Evaluasi Internal	25	10,22	13,47
Nilai hasil Evaluasi	100	53,51	60,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen RPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025
			Target	Realisasi	Capaian	Target
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60	43,43**	72,38	62,50
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100	B

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan :

- Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 dan melakukan reviu dan perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati maupun Kepala Perangkat Daerah sehingga kualitas perencanaanya meningkat
- Melakukan Perbaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menyertakan formulasi dan defenisi operasional untuk setiap indikator kinerja
- Meningkatkan kualitas penyajian informasi pada LPPD dan laporan kinerja PD sehingga meningkatkan kualitas pemanfaatannya.
- Telah menyusun pedoman evaluasi AKIP Internal dan melakukan evaluasi pada PD Utama sesuai dengan pedoman tersebut.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk dapat semakin meningkatkan kualitas implementasi sakip adalah :

- Terus melakukan reviu atas rumusan kinerja yang ada dan memperhatikan setiap kondisi kinerja maupun isu strategis yang dimiliki sehingga kualitas rumusan kinerja yang dimiliki dapat menjadi semakin baik
- Memastikan setiap indikator kinerja yang digunakan agar dapat SMART dan cukup untuk mengukur sasaran strategis atau keberhasilan pencapaian kinerja
- Melakukan reviu dan menetapkan seluruh target kinerja dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya
- Menyusun pohon kinerja baik dari level Kabupaten maupun seluruh PD dengan berpedoman pada PermenpanRB No 89 Tahun 2021.
- Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja berbasis teknologi informasi

- Mendorong pemanfaatan rencana aksi sebagai alat dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang telah diperjanjikan
- Meningkatkan kualitas evaluasi internal yang telah dilakukan dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik
- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah saat ini telah melakukan upaya pemanfaatan teknologi informasi dengan membuat sebuah aplikasi berbasis website, yakni dengan mengembangkan sistem aplikasi SmartSAKIP. Aplikasi SmartSAKIP memiliki fitur-fitur dan menu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan monitoring proses implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup perencanaan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Terdapat empat menu utama dalam aplikasi SmartSAKIP yakni dashboard, perencanaan, progress kinerja, dan laporan. Pada menu perencanaan, pemerintah daerah dapat memasukkan data perencanaan RPJMD. Begitupun Perangkat Daerah juga dapat memasukkan data perencanaan renstra, renja, dan rencana penganggaran. Sasaran yang diinputkan pada RPJMD akan otomatis menjadi tujuan renstra Perangkat Daerah sesuai dengan pengampu yang sudah ditentukan. Pada menu progress kinerja, pemerintah daerah dapat memasukkan data realisasi kinerja bulanan RPJMD. Begitupun perangkat daerah dapat memasukkan data realisasi bulanan renstra, renja, dan anggaran. Pada menu laporan, pemerintah daerah dan perangkat daerah dapat mencetak dokumen LKJIP sesuai dengan data yang sudah diinputkan pada perencanaan dan progress kinerja. Sedangkan pada menu dashboard berisikan data-data rekapan yang berguna untuk mempermudah proses monitoring capaian kinerja.

Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP**	100

- Opini BPK, sebagaimana pada Tabel diatas relisasi pada indikator ini masih menggunakan data sementara yaitu data pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh karena saat laporan ini disusun, masih dilakukannya proses pra audit terhadap seluruh dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumba Tengah Tahun 2024 sehingga pencapaian realisasi ini belum dapat dirilis. Secara pencapaian secara berturut2

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Un audit

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target RPD
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Un audit	WTP

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumba Tengah dalam mempertahankan Opini BPK antara lain :

- Membangun komitmen bersama antara pimpinan daerah dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan pengendalian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
 - Menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK secara baik dari tahun ke tahun. Khususnya pada Tahun 2024 tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP mencapai 83,14 %.
 - Membuat rencana aksi
 - Adanya dukungan IT yang memadai terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran (SIPD Perencanaan dan SIPD keuangan)
 - Membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Langkah kedepan yang akan dilakukan dalam meningkatkan Opini BPK antara lain:
- Memperkuat komitmen bersama antara pimpinan daerah bersama seluruh jajarannya
 - Memperkuat peran APIP melalui peningkatan kapabilitas APIP dan melaksanakan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Mengoptimalkan penerapan SPIP untuk mengantisipasi adanya temuan berulang oleh BPK
 - Melaksanakan bimbingan teknis dan desk secara intensif dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
 - Membentuk Tim dan antisipasi temuan tahun berjalan

Sasaran 14 : Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi							
No	Indikator Kinerja			Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Skor	Survey	Penilaian	Skor	80	73,84	92,3
	Integritas						

Skor Survey Penilaian Integritas, yang menysasar pegawai pemerintahan, pengguna layanan public serta para ahli dan pakar dengan tujuan untuk memetakan celah korupsi yang terjadi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Hasil dari survey ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi. Skor Survey Penilaian Integritas dibagi menjadi Tiga Kategori yaitu merah (Rentan), Kuning (Waspada) dan Hijau (terjaga). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Survey Penilaian Integritas yang ditargetkan 80 dapat direalisasikan menjadi 73,84 dengan peningkatan status menjadi Kategori Waspada. Skor SPI Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah skor tertinggi urutan ke – dua se Provinsi NTT. Apabila di sandingkan dengan Pencapaian Tahun lalu ada peningkatan sebesar 5, 84.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja			Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
					Realisasi	Realisasi
1.	Skor	Survey	Penilaian	Skor	68	73,84
	Integritas					

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam upaya pencapaian Skor Survey Penilaian Integritas ini antara lain :

- Adanya komitmen pimpinan daerah yang senantiasa menggalakkan upaya pencegahan korupsi dan penguatan kesadaran berintegritas pada berbagai kesempatan public

- Melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan pelaksanaan Survey Penilaian Integritas dalam berbagai bentuk (Surat Himbauan, pemasangan banner, WAG, serta Perguruan Tiggi dalam bentuk Tim CAPI, mendatangi langsung Unit Pelayanan Publik) kepada Kelompok Sasaran Survey yaitu sasaran Internal, Eksternal dan Expert.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah antara lain:

- Melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan upaya pencegahan korupsi, dan himbauan untuk berpartisipasi sebagai responden SPI secara jujur dan obyektif
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini salahsatunya akan memanfaatkan website Sumba Tengah sebagai media mempublikasikan informasi terkait dengan kebijakan,anggaran dan pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa
- Memperbaiki kualitas layanan public dalam hal ini penetapan Standar Pelayanan Public pada UPP dengan menyederhanakan prosedur layanan
- Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan integritas.

Sasaran 15 : Terwujudnya transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public						
No	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemerintahan Elektronik (SPBE)	Sistem Berbasis Elektronik	Indeks	2,50	2,19	87,6

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah

Keberhasilan SPBE perlu didukung sumber daya manusia SPBE yang mencakup masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai pengguna SPBE. Penerapan SPBE juga sangat membutuhkan kepemimpinan digital untuk memastikan penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya peningkatan implementasi SPBE dimana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan 4 domain dalam SPBE yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2024 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE yang terbentuk melalui SK Bupati Sumba Tengah serta menetapkan

Peraturan Bupati Sumba Tengah No....Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sumba Tengah.

Untuk meningkatkan skor indeks SPBE beberapa langkah startegis yang akan dilakukan antara lain :

- Menyusun dan memperbaharui regulasi terkait dengan SPBE
- Membentuk tim koordinasi SPBE yang melibatkan berbagai sektor terkait
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang teknologi dan digitalisasi
- Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi SPBE

Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas pelayanan public					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,0	1,72	57,33

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik atau program pemerintah memenuhi harapan masyarakat. Pengukuran ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar – benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan pada berbagai aspek layanan. Pada lingkup Pemerintah Daerah Sumba Tengah, unit pelayanan publik telah didampingi untuk melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan pedoman yang terdiri dari sembilan unsur yakni : persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif layanan, kualitas produk, kompetensi petugas, perilaku petugas,sarana dan pra sarana, serta penanganan pengaduan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Tengah. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ **Money Follow Function** “ yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan yaitu : (1) pengelolaan pendapatan daerah, (2) pengelolaan belanja dan (3) pengelolaan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan Pendapatan Asli daerah.
Penerapan kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya.
Kabupaten Sumba Tengah yang sumber PAD-nya sebagian besar dari sektor pertambangan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Di sisi lain potensi yang cukup besar dari PAD Sumba Tengah terutama dari komponen peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
2. Peningkatan Dana Perimbangan
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat.

Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian.

3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Langkah-langkah untuk peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilakukan dengan menetapkan APBD tepat waktu dan memperkecil SILPA sehingga dapat memperoleh Dana Insentif daerah.

4. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat diketahui arah pembangunan Kabupaten Sumba Tengah. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran.

3.3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024, dan Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD termasuk Dana Perimbangan		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PENDAPATAN DAERAH	672.754.347.358,00	659.089.370.212,39	97,97
1	Pendapatan Asli Daerah	28.240.524.743,00	24.275.137.006,81	85,96
2	Dana Perimbangan	639.188.113.307,00	629.340.026.908,00	98,46
3	Lain-Lain Pendapatan	5.325.709.308,00	5.474.206.297,58	102,79
II	BELANJA DAERAH	714.620.603.497,91	657.947.674.889,84	92,07
1.	Belanja Operasi	489.545.248.718,9	434.389.304.762,50	88,73
	Belanja Modal	120.727.171.304,0	119.971.683.892,34	99,37
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0	0

No	Uraian	APBD termasuk Dana Perimbangan		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Belanja Transfer	103.848.183.475,0	103.586.686.235,00	99,75
III	PEMBIAYAAN DAERAH	41.866.256.139,91	41.915.256.137,91	100,12
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.916.256.139,91	51.361.377.636,53	100
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.050.000.000,00	6.000.000.000,00	99,17



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan”. Tujuan pemberian tugas pembantuan secara umum adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari anggaran Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah merupakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian berjumlah 2 (Dua) Tugas pembantuan yaitu di bidang Pertanian dan Pangan, dan Tugas Pembantuan bidang Pangan dari Pemerintah Provinsi NTT.

Penugasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bidang Pertanian dan Pangan dengan jenis Kegiatan yang meliputi:

- a. Kegiatan perbenihan Tanaman Pangan Padi;
- b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia;
- c. Kegiatan pemantauan stok pangan;
- d. Kegiatan Pengembangan jagung reprioritas;
- e. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Tugas pembantuan dari kementerian pertanian dan dinas pertanian provinsi NTT yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten:

3.1.1 Target Kinerja

Target yang ditetapkan oleh kementerian pertanian atas pelaksanaan penugasan adalah sebagai berikut:

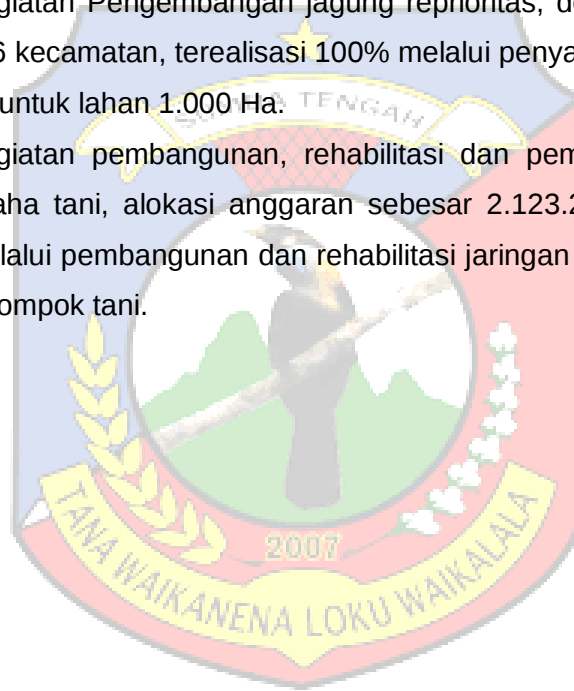
- a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia dengan target anggaran sebesar Rp. 12.500.000;
- b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia dengan target anggaran sebesar Rp. 9.750.000;
- c. Kegiatan pemantauan stok pangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 121.830.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sub kegiatan Pemantauan Stok Pangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.500.000;
 - 2) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.010.000;
 - 3) Sub.kegiatan pengelolaan dan keseimbangancadangan pangan kabupaten/kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.660.000;
 - 4) Sub kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.660.000;
 - 5) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000;
 - 6) Sub kegiatan penyusunan dan pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.
- d. Kegiatan Pengembangan jagung reprioritas, dengan target 34 gapoktan di 6 kecamatan;
- e. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, alokasi anggaran sebesar 2.123.200.000.

3.1.2 Realisasi

Realisasi yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah atas pelaksanaan penugasan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perbenihan Tanaman Pangan Padi dengan target anggaran sebesar Rp. 12.500.000, terealisasi 100%. Realisasi kegiatan berupa penyaluran benih label 125 kg, pupuk NPK 5.000 kg, Urea 250 Kg, dan pestisida 5 paket untuk lahan seluas 5 Ha, di desa praikaroku jangga (poktan Namu Tumalangu);
- b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia dengan target anggaran sebesar Rp. 9.750.000, terealisasi 100%. Realisasi kegiatan berupa penyaluran benih label 12.500 kg, pupuk NPK 50.000 kg dan pestisida 500 paket untuk luas lahan 500 Ha, pada 26 Gapoktan di 3 kecamatan yaitu Katikutana Selatan, Umbu Ratu Nggay Barat dan Umbu Ratu Nggay Tengah.
- c. Kegiatan pemantauan stok pangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 121.830.000, terealisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Pemantauan Stok Pangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.500.000, realisasi 100%.
 - 2) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.010.000, realisasi 100%.
 - 3) Sub.kegiatan pengelolaan dan keseimbangancadangan pangan kabupaten/kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.660.000, realisasi 100%.
 - 4) Sub kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.660.000, realisasi 100%.
 - 5) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000, realisasi 100%.
 - 6) Sub kegiatan penyusunan dan pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000, realisasi 100%.
- d. Kegiatan Pengembangan jagung reprioritas, dengan target 34 gapoktan di 6 kecamatan, terealisasi 100% melalui penyaluran benih jagung 15.000 kg untuk lahan 1.000 Ha.
- e. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, alokasi anggaran sebesar 2.123.200.000, terealisasi 100% melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada 17 kelompok tani.

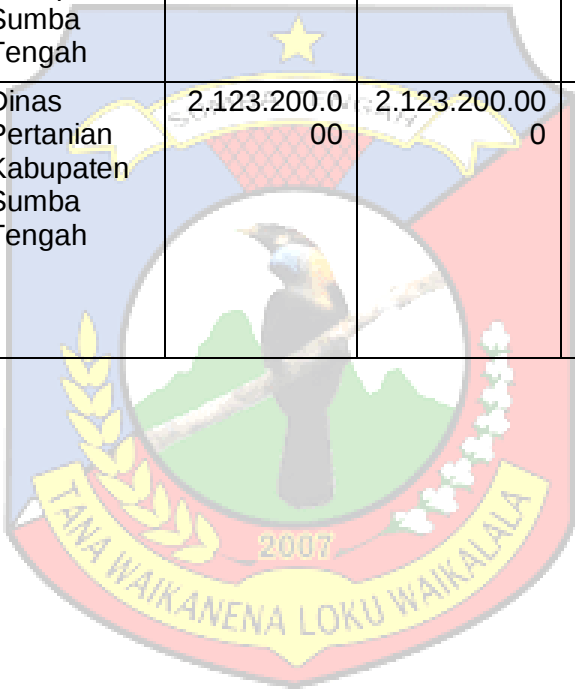


Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Sumba Tengah

No	Kemen terian/ LNPK	Dasar pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		DIPA Tahun Anggaran 2024 Revisi 02 Nomor: SP DIPA-125.01.3.6907 22 tanggal 16 Februari 2024	Kegiatan perbenihan Tanaman Pangan Padi	Sumba Tengah	Dinas Pertanian Kab. Sumba Tengah	12.500.000	12.500.000	100%	Penyaluran benih label 125 kg, pupuk NPK 5.000 kg, Urea 250 Kg, dan pestisida 5 paket untuk lahan seluas 5 Ha, di desa praikaroku jangga (poktan Namu Tumulangu)	100%	
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	Sumba Tengah	Dinas Pertanian Kab. Sumba Tengah	9.750.000	9.750.000	100%	Penyaluran benih label 12.500 kg, pupuk NPK 50.000 kg dan pestisida 500 paket untuk luas lahan 500 Ha, pada 26 Gapoktan di 3 kecamatan yaitu Katikutana Selatan, Umbu Ratu Nggay Barat dan Umbu Ratu Nggay Tengah	100%	

			Kegiatan pemantauan stok pangan	Sumba Tengah	Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah	121.830.000	121.670.000	100%	-	100%	
		Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTT	Kegiatan Pengembangan jagung reprioritas	Sumba Tengah	Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah	-	-	100%	penyaluran benih jagung 15.000 kg untuk lahan 1.000 Ha di 6 Kecamatan	100%	
			Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya	Sumba Tengah	Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah	2.123.200.000	2.123.200.000	100%	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada 17 kelompok tani	100%	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025



3.2. Permasalahan dan Kendala

Adapun hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Sumba Tengah adalah masih minimnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat..

3.3. Saran dan Tindak Lanjut

Menanggapi hambatan atau permasalahan yang dihadapi tersebut maka pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya untuk melakukan koordinasi berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaan di tahun berikutnya dapat berjalan secara efektif dan efisien.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah:

- 1. Pendidikan anak usia dini (peserta didik yang berusia 5-6 tahun);
- 2. Pendidikan dasar (peserta didik yang berusia 7-15 tahun); dan
- 3. Pendidikan kesetaraan (peserta didik yang berusia 7-18 tahun).

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM urusan Pendidikan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah adalah Sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2024
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari dua tahun sebelumnya	2024
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	2024

4.1.3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	100%	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam	100%	100%	2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)	Batas Waktu Pencapaian
		Pendidikan Dasar			
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	2024

- Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD sebanyak 3.652 anak dari jumlah anak usia 5-6 tahun sebanyak 3.652 anak.
- Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebanyak 16.010 anak dari jumlah anak usia 7-15 tahun sebanyak 16.010 anak.
- Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan sebanyak 223 anak dari jumlah anak usia 7-18 tahun sebanyak 223 anak.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pererapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

a. APBD : Rp. 44.861.055.522

Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	8,063,415,528	7,744,572,824	96,05%
2.	Pendidikan Dasar	36,453,739,994	35,357,570,864	96,99%
3.	Pendidikan Kesetaraan	343,900,000	153,711,6000	44,70%
Jumlah Total		44,861,055,522	43,255,855,288	96.42 %

b. APBN : -

c. Sumber Dana Lain yang Sah : -

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengawas Sekolah	Guru SD	Guru SMP	Tenaga Non Guru SD	Tenaga Non Guru SMP
55	12	568	550	239	137

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal yang dilakukan adalah melalui pendataan dengan menyebarkan instrumen beserta petunjuk pengisiannya kepada sekolah, merupakan hal baru bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah, yaitu melakukan pendataan SPM secara langsung kepada semua SD dan SMP baik negeri maupun swasta, sehingga didapati kendala pada saat pengisian instrumen, baik oleh Dinas, Pengawas dan Sekolah belum secara maksimal dilaksanakan.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui bimtek kepada kepala sekolah dan operator sekolah tentang cara pengisian instrumen, selain itu juga dilakukan pendampingan bagi pengawas Sekolah untuk pengukuran indikator pencapaian SPM hal ini dimaksud agar pengawas dapat memverifikasi instrumen yang sudah diisi oleh sekolah binaanya. Langkah selanjutnya yang dilakukan ditingkat Dinas data tersebut diverifikasi kembali dengan melibatkan beberapa Operator Sekolah sebelum dijadikan data final untuk pengukuran penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumba Tengah.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4. Pelayanan kesehatan balita;
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penerapan dan pencapaian SPM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus	100%	2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	melitus	yang mendapat layanan kesehatan		
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	2024
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan	100%	2024

4.2.3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	76,76%	2024
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	100%	77,61%	2024
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	100%	79,76%	2024
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	100%	86,93%	2024
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	90,38%	2024
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	63,12%	2024
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	100%	81,04%	2024
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	100%	90,82%	2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan kesehatan	100%	93,86%	2024
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	119,44%	2024
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan	100%	80,73%	2024
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan	100%	77,77%	2024

- Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.645 orang dari jumlah ibu hamil sebanyak 2.136 orang;
- Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.922 orang dari jumlah ibu bersalin sebanyak 2.090 orang;
- Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.888 orang dari jumlah bayi baru lahir sebanyak 1.991 orang;
- Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 7.742 orang dari jumlah balita sebanyak 8.906 orang;
- Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 15.029 orang dari jumlah warga negara usia Pendidikan dasar sebanyak 16.628 orang;
- Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 43.379 orang dari jumlah warga negara usia produktif sebanyak 52.722 orang;
- Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 5.568 orang dari jumlah Warga Negara usia lanjut sebanyak 6.871 orang;
- Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 11.777 orang dari Jumlah Warga Negara penderita hipertensi sebanyak 12.967 orang;

- Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 275 orang dari Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus sebanyak 293 orang;
- Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan sebanyak 86 orang dari Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat sebanyak 72 orang;
- Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.378 orang dari Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi sebanyak 1.707 orang;
- Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 1.397 orang dari Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sebanyak 1.745 orang.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. APBD : Rp. 4.861.301.720

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	879.509.000	733.731.000	83,43%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	750.802.000	703.362.000	93,68%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	361.699.320	313.907.000	86,79%
4.	Pelayanan kesehatan balita	802.915.000	686.136.300	85,46%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	432.130.000	402.772.000	93,21%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	588.436.000	480.006.000	81,57%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	196.452.000	181.306.000	92,29%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	98.928.000	91.868.000	92,86%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	234.380.000	230.851.000	98,49%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	35.400.000	31.680.000	89,49%

11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	419.850.400	398.468.000	94,91%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	60.800.000	50.630.000	83,27%
Jumlah Total		4.861.301.720	4.304.717.300	88,55%

- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

4.2.5. Dukungan Personil

Personil yang tersedia untuk menunjang penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	455 orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang
4.	Pelayanan kesehatan balita	489 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	552 orang	Dokter 25 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	489 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	549 orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Tenaga

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	Keterangan
			Gizi 35 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	302 Orang	Dokter 22 Orang, Perawat 280 Orang
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	400 Orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Ahli Teknik Laboratorium Medik 36 Orang, Radiografer 1 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	551 Orang	Dokter 23 Orang, Perawat 280 Orang, Bidan 152 Orang, Ahli Teknik Laboratorium Medik 36 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 60 Orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi anggaran masih lebih banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Belum semua Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dibutuhkan untuk pelayanan dasar tersedia sesuai kebutuhan, baik jumlah, jenis dan penyebarannya;
3. Belum semua sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) yang dibutuhkan untuk pelayanan dasar tersedia sesuai kebutuhan, baik jumlah, jenis dan penyebarannya;
4. Kualitas perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal.

b. Solusi:

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan SDM;
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan SPA;
4. Meningkatkan kualitas atau efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar di bidang kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	2024
2.	Penyediaan pelayanan Pengelohan air Limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domsetik	100%	2024

4.3.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	61,03%	2024
2.	Penyediaan pelayanan Pengelohan air Limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domsetik	100%	67,74%	2024

- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari–hari sebanyak 51.801 jiwa dari Jumlah warga negara yang harus memperoleh kebutuhan pokok air minum sebanyak 84.884 jiwa;
- Jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domsetik sebanyak 43.440 Kepala Keluarga dari Jumlah Kepala Keluarga yang harus memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domsetik sebanyak 64.128 Kepala Keluarga.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. APBD : Rp. 27.471.460.107

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp. 18,062,757,940	Rp. 17,937,338,612 atau 99,31%
2	Penyediaan pelayanan air limbah domestik	Rp. 9,408,702,167	Rp. 9,139,140,830 atau 97.13 %
Jumlah Total		Rp. 27,471,460,107	Rp. 27,076,479,442 atau 98,56%

b. APBN : -

c. Sumber dana lain yang sah : -

4.3.5 Dukungan Personil

- a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari memiliki dukungan personil sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 orang PNS dan 1 orang tenaga non ASN;
- b) Penyediaan air limbah pengolahan domestik memiliki dukungan personil sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 orang PNS, 4 orang Non PNS dari DAK.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- a) Permasalahan
 - 1) SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/SKPD lain sebagai mitra kerja yaitu antara lain Bappelitangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPBD sehingga pencapaian beberapa SPM sulit tercapai karena kurangnya koordinasi;
 - 2) Kurangnya fasilitas dan utilitas yang mendukung tercapainya SPM;
 - 3) Kurangnya dukungan dana untuk mencapai target dari SPM.
- b) Solusi
 - 1) Menambah fasilitas dan utilitas yang mendukung demi tercapainya target SPM;
 - 2) Menambah dukungan dana untuk mencapai target SPM.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	2024

4.4.3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	0%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	2024

- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebanyak 0;
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebanyak 0 unit dari Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebanyak 0 unit.

4.4.4. Alokasi Anggaran

- a. APBD : -
- b. APBN : -
- c. Sumber dana lain yang sah : -

4.4.5. Dukungan Personil

SDM yang tersedia pada urusan perumahan rakyat yaitu 7 orang PNS.

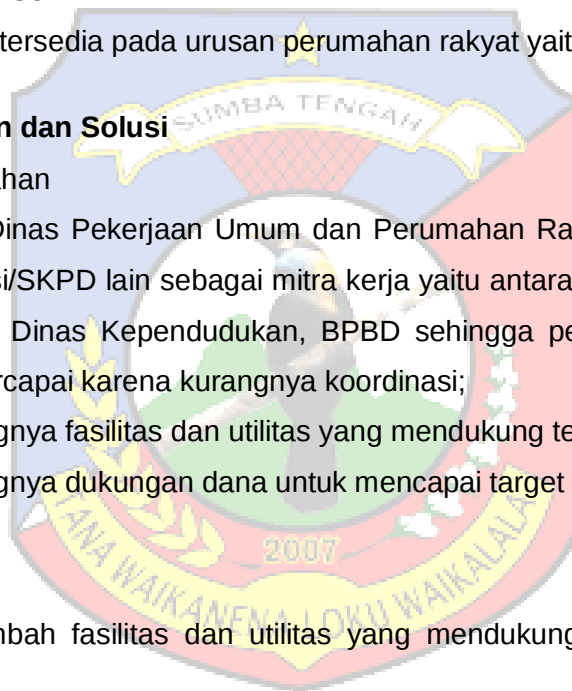
4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/SKPD lain sebagai mitra kerja yaitu antara lain Bappelitangda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPBD sehingga pencapaian beberapa SPM sulit tercapai karena kurangnya koordinasi;
- 2) Kurangnya fasilitas dan utilitas yang mendukung tercapainya SPM;
- 3) Kurangnya dukungan dana untuk mencapai target dari SPM.

b. Solusi

- 1) Menambah fasilitas dan utilitas yang mendukung demi tercapainya target SPM;
- 2) Menambah dukungan dana untuk mencapai target SPM.



4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah pelayan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	2024
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100 %	2024

		penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	2024

4.5.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	100%	2024
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	91,65%	2024
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	0%	2024

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota sebanyak 50 dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 50;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 250 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 250 orang;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 250 orang;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 1 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 1 orang;
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran sebanyak 80 dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 80.

4.5.4 Alokasi anggaran

- a. APBD
- b. APBN
- c. Sumber dana lain yang sah

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sampai dengan Bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Kepala Satuan	Pembina Utama Muda /IVc	ASN	1
2	Sekretaris	-	ASN	-
3	Kepala Bidang	Pembina/Iva	ASN	2
4		Penata Tk.I III/d	ASN	2
5	Kepala Seksi	Penata Tk.I III/d	ASN	4
6		Penata III/c	ASN	4
7	Kelompok Fungsional	Penata Tk.I III/d	ASN	3
8	Staf	Penata Muda III/a	ASN	1
9	Staf	Pengatur Tk.I- II/d	ASN	2
10	Staf	Pengatur II/c	ASN	2
11	Staf	II/b	ASN	1

NO	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Banpol	Non ASN	51
2	Sopir	Non ASN	3
3	Tenaga Administrasi/Operator Komputer	Non ASN	2
4	Pramusaji	Non ASN	2

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung;
- Kurangnya BIMTEK/DIKLAT dalam rangka peningkatan kompetensi personil SatpolPP terkait tupoksi;
- Belum maksimalnya koordinasi antara OPD terkait.

b. Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas :

- Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
- Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan OPD terkait.



4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial;
- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial;
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial;
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial;
- 5. Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0%	2024
5	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah	Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota	100%	2024

	Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	yang memperoleh perlindungan dan jami nan sosial		
--	---	--	--	--

4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0%	0%	2024
5	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jami nan sosial	100%	100%	2024

- Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 62 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 62 orang;

- Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 219 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 219 orang;
- Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 25 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 25 orang;
- Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti yang mendapat pelayanan sebanyak 0;
- Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang mendapat pelayanan sebanyak 18 orang dari jumlah yang harus dilayani sebanyak 18 orang.

4.6.4 Alokasi Anggaran

a. APBD : Rp. 0

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sosial	0	0
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	0	0
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sosial	0	0
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sosial	0	0
8.	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	0	0
Jumlah Total		0	0

b. APBN : -

c. Sumber dana lain yang sah : -

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 20 orang
- b. Non-PNS = 19 orang

Nomor	Golongan	Eselon			Staf	Keadaan per 31 Desember 2024 (orang)
		II	III	IV		
1.	IV	1	1	-		2
2.	III		3	9	3	15
3.	II	-	-	-	3	3
4.	Kontrak				19	19
Total						39

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
 - 2. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
 - 3. Kondisi Geografis Sumba Tengah yang mempengaruhi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 4. Minimnya dana dalam melakukan pendataan bagi PMKS;
 - 5. Ketersediaan sumber Daya Manusia masih sangat kurang dalam mencukupi kebutuhan dalam mendukung program/kegiatan yang ada;
 - 6. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar di bidang Sosial bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Solusi
 - 1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
 - 2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
 - 4. Dukungan dari Pemerintah Daerah berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah yang memberikan ruang gerak kepada Dinas Sosial untuk lebih kreatif, inovatif dalam upaya memberikan pelayanan sosial pada masyarakat;

5. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perbantuan dan dana dekonsentrasi, membantu mengatasi masalah namun belum optimal;
6. Menambah dukungan dana untuk mencapai target dari SPM.



BAB V

PENUTUP

Berbagai data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini merupakan hal ikhwal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024. Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil pemerintah pusat atas dukungan dan perhatiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumba Tengah dapat berjalan dengan baik, serta terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini.

Pemerintah menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian data dan informasi sehingga kritik dan saran yang konstruktif dan membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan dokumen ini.

Waibakul, 21 Maret 2025

